

**PENGARUH PENERAPAN PENGAWASAN APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)
TERHADAP KUALITAS PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DESA**
(Studi Penelitian Kantor Desa se Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato)

Oleh :

NURFATIA PATUKE

NIM : E1118016

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH PENERAPAN PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA (Studi Penelitian Kantor Desa Se kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato)

OLEH :

NURFATIA PATUKE

E.11.18.016

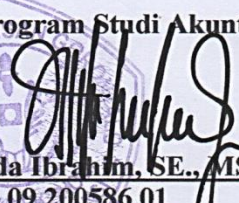
Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Reyther Biki, SE., M.Si
(Ketua Penguji)
2. Rahma Rizal, SE.Ak., M.Si
(Anggota Penguji)
3. Melinda Ibrahim, SE., M.SA
(Anggota Penguji)
4. Dr. Bala Bakri, SE., MM
(Pembimbing Utama)
5. Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui,


Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 09 281169 01

Ketua Program Studi Akuntansi

Melinda Ibrahim, SE., MSA
NIDN. 09 200586 01

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH PENERAPAN PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA

(Studi Penelitian Kantor Desa se Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato)

Oleh :

NURFATIA PATUKE

NIM : E1118016

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dan Telah di Setujui Oleh Tim Pembimbing pada Tanggal
Gorontalo, 31 Mei 2022**

Pembimbing I



DR. BALA BAKRI SE., MM
NIDN : 0002057501

Pembimbing II



RUSDI ABDUL KARIM, SE., M.Ak
NIDN : 0902086402

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 18 juni 2022
membuat pernyataan,



Nurfatia Patuke
NIM. E1118016

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**SESUNGGUHNYA ORANG YANG MENGHAMBUR-HAMBURKAN
UANG MENJADI TEMANNYA SETAN DAN SETAN ITU TELAH
KUFUR KEPADA TUHANNYA**

PERSEMBAHAN

SKRIPIS INI SAYA PERSEMBAHKAN SEPENUHNYA KEPADA :

- 1. IBUNDAKU "RATNI UMAR TUAHUNSE, SE", BELIAULAH YANG
MEMBUAT SEGALANYA MENJADI MUNGKIN SEHINGGA ANAKDA
BISA SAMPAI PADA TAHAP DIMANA SKRIPSI INI AKHIRNYA
SELESAI.**

**TERIMA KASIH ATAS SEGALA PENGORBANANMU, NASEHAT DAN DOA
RESTUMU YANG SUCI TULUS TIDAK PERNAH BERHENTI SEDETIKPUN
KEPADA
ANAKDA YANG TERKASIH.**

**SEBAGAI BALASANNYA ANAKDA TIDAK PERNAH HENTI BERSYUKUR
WALAU SEKEJAP KARENA MEMILIKIMU SEBAGAI PERISAI DALAM
HIDUP DAN MATIKU SAMPAI DI AKHIR NANTI.**

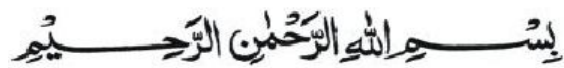
**HARAPAN ANAKDA SEMOGA KERINGAT DAN AIR MATA PERJUANGAN
TUK ANAKDA MENJADI BULIR-BULIR EMBUN YANG DAPAT MENGAPUS
DAHAGAMU DI TENGAH PADANG MASAR DAN MULIA SELAMANYA
DI SISI-NYA.**

AMIN, AMIIN, AMIIN YA RABBAL ALAMIN

- 1. KEPADA ALMAMATERKU TERCINTA
TAKKAN KULUPAN SELAMA HAYAT DI KANDUNG BADAN
WADAH DALAM MENIMBAH ILMU HARTA TIADA BANDING**

**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTOLA
JAYA SELAMANYA
INSYA ALLAH**

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang terindah kecuali mengucap puji syukur alhamdulillah, penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT. karena hanyalah Berkah, Rahmat dan Hidayah-Nyalah, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi rumusan judul ”Pengaruh Penerapan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Penelitian Kantor Desa Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato)”.

Meskipun skripsi telah rampung, namun peneliti menyadari, bahwa masih banyak kekeliruan atau kesalahan di dalamnya baik secara teknis maupun konsep, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan atau saran dari para pembaca yang sifatnya membangun untuk kelengkapan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini, peneliti juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Hi. Abdul Gaffar La. Tjokke, M. Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Hi. Musafir, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo. Ibu Melinda Ibrahim, SE, M.S.A, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Bala Bakri, SE, MM, selaku Pembimbing I. Bapak Rusdi Abdul Karim SE. M.Ak, selaku Pembimbing II. Para kepala desa sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato yang memberikan kesempatan penelitian pada instansi yang dipimpinnya. Teristimewa Kedua orang tua yang telah memberikan Motivasi, inspirasi dan doa yang tiada

henti dengan tulus demi kesuksesan peneliti. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan selama menempu pendidikan di Universitas Ichsan Gorontalo.

Atas segala bentuk dukungan dan partisipasinya berupa masukan dan saran demi kelengkapan skripsi diucapkan terima kasih tak terhingga nilainya.

Gorontalo, Juni 2022

Penulis

ABSTRAK

Nurfatia Patuke, NIM : E1118016 mengangkat judul penelitian "Pengaruh penerapan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah desa (Studi Penelitian Kantor Desa Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato)".

Metode analisis data yang digunakan untuk membuktikan hipotesis adalah; uji validitas, releabilitas regresi sederhana, kolerasi dan uji signifikan, Tujuan penelitian yang dilakukan adalah; Untuk melakukan analisis pengaruh Penerapan Pengawasan APIP terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah desa (Studi penelitian Kantor Desa Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato). Hasil olahan data diperoleh nilai koefisien variabel (b) sebesar 0,685 atau 68,50%. Artinya, pengaruh pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari sepuluh (10) indikator terhadap kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Desa Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato bersifat positif sebesar 68,50% dan ini menjelaskan, bahwa pengaruh tersebut masuk dalam

Kata Kunci : Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Keuangan

The research objective is to analyze the effect of the supervision implementation of the Government Internal Supervisory Apparatus on the financial reporting quality of village government (a study of All Village Offices in Marisa Subdistrict in Pohuwato District). The data analysis methods used to prove the hypothesis are validity, reliability, simple regression, correlation, and significance tests. The results of the processed data obtained, the value of the variable coefficient (b) is 0.685 or 68.50%. It means that the effect of the supervision of the Government Internal Supervisory Apparatus consisting of 10 (ten) indicators on the financial reporting quality of all village governments of Marisa Subdistrict in Pohuwato District is positive, namely at 68.50%. It explains that the effect is strong and significant.

Keywords: supervision and reporting, financial performance

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Maksud dan Tujuan penelitian	5
1.3.1. Maksud peneltian.....	5
1.3.2. Tujuan penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Definisi Akuntansi	6
2.1.1. Akuntansi Keuangan Daerah	7
2.1.2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	20
2.2. Pengawasan atau Pengendalian.....	21
2.3. Kualitas Pelaporan Keuangan	25
2.3.1. Karakteristik kualitatis pelaporan keuangan	28
2.3.2. Elemen-Element Laporan Keuangan.....	30
2.4. Peneltian Terdahulu	31
2.5. Kerangka Pikir	33

2.6. Hipotesis.....	35
BAB III OBYEK METODOLOGI PENELITIAN.....	36
3.1. Obyek Penelitian	36
3.2. Metode Penelitian.....	36
3.2.1. Desain Penelitian.....	36
3.2.2. Operasionalisasi variabel Penelitian.....	36
3.2.3. Teknik pengumpulan data	39
3.2.4. Jenis dan Sumber Data	40
3.2.4.1. Sumber Data	40
3.2.4.2. Jenis Data	40
3.2.5. Populasi dan Sampel	40
3.2.5.1. Populasi	40
3.2.5.2. Sampel	43
3.2.6. Metode Analisis Data	44
3.2.6.1. Uji Validitas	44
3.2.6.2. Uji Reliabilitas.....	44
3.2.6.3. Uji Asumsi Klasik	45
3.2.6.4. Uji Korelasi	45
3.2.6.5. Uji Signifikan	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian.....	48
4.2. Identifikasi Rseponden.....	51
4.3. Deskripsi Hasil Peneltian	54
4.3.1. Analisis Variabel Pengawasan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).....	55
4.3.2. Analisis Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan	58
4.4. Hasil Analisis Data	64
4.4.1. Hasil Uji Validitas	64
4.4.2. Hasil Uji Reliabilitas.....	67
4.4.3. Uji Asumsi Klasik.....	69

4.4.5. Analisis Korelasi dan Uji Signifikan	72
4.5. Pembahasan	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran-Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pencatatan Sistem <i>Double Entry</i>	13
Tabel 2.2. Sistem Pencatatan <i>Doble Entry</i>	18
Tabel 3.3. Operasionalisasi Variabel Pengawasan APIP.....	37
Tabel 3.4. Operasionalisasi Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan.....	38
Tabel 3.5. Bobot Alternatif Skala Likert.....	39
Tabel 3.6. Daftar Nama-Nama Populasi Penelitian	41
Tabel 3.7. Daftar Nama-Nama Responden Penelitian	43
Tabel 3.8. Interpretasi Koefisien Nilai r.....	48
Tabel 4.9. Jenis Kelamin Responden	51
Tabel 4.10. Tingkat Pendidikan Responden	52
Tabel 4.11. Rentang Skala Skor Item Pertanyaan.....	54
Tabel 4.12. Tanggapan Responden terhadap Variabel Pengawasan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah	54
Tabel 4.13. Tanggapan Responden terhadap Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan.....	58
Tabel 4.14. Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (X).....	67
Tabel 4.15. Hasil Uji Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan (Y)	68
Tabel 4.16. Hasil Uji <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	69
Tabel 4.17. <i>Coefficients</i>	70
Tabel 4.18 <i>Model Summery</i>	71
Tabel 4.19. <i>Correlations</i>	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Siklus Akuntansi	9
Gambar 2.2. Sub Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	11
Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran	34
Gambar 4.4. <i>Scatterplot</i>	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadwal Penelitian	87
Lampiran 2. Kuisisioner Penelitian	88
Lampiran 3. Tabulasi T. Responden terhadap Variabel Pengawasan APIP ..	92
Lampiran 4. Uji Validitas Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan (Y).....	93
Lampiran 5. Hasil Olahan Data.....	94
Lampiran 6. Surat Rekomendasi Penelitian	100
Lampiran 7. Surat Balasan Penelitian	101
Lampiran 8. Surat Bebas Plagiasi	102
Lampiran 9. Hasil Test Tuernitin	103
Lampiran 10. <i>Curriculum Vitae</i>	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja pemerintah daerah, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah, terbentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pohuwato. Awal berdirinya SKPD Inspektorat Daerah (ITDA) ini diawali dari Badan Pengawas Daerah yang disebut BAWASDA Tahun 2003 yang dipimpin oleh seorang Inspektur dan seorang KTU, Bagian tata usaha terdiri dari sub bagian keuangan, sub bagian perencanaan, administrasi, evaluasi dan pelaporan dan tiga bidang terdiri dari bidang pengawasan pemerintahan dan aparatur dan dua sub bagian, bidang pengawasan pembangunan dan dua sub bagian, dan bidang pengawas keuangan dan aset dan dua sub bagian serta jabatan fungsional sebagai cikal bakal berdirinya ITDA Kabupaten Pohuwato. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pohuwato berdiri sejak terbentuk Kabupaten Pohuwato sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Boalemo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.

Pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2005 terbentuklah Organisasi Tata Kerja (OTK) Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato menyusun Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam rangka mewujudkan sistem administrasi pemerintahan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal efektif dan profesional.

Salah satu bentuk tugas utama inspektorat adalah melaksanakan pengangawasan. Hal ini dimaksudkan demi mengoptomalkan pengelolaan keuangan instansi. Salah satu sasaran utamanya adalah kualitas pengelolaan keuangan desa, dimana sampai sekarang belum menunjukkan suatu kinerja yang baik. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai bentuk pelanggaran atau penyelewengan dalam penerapannya. Dengan demikian kualitas pelaporan keuangan desa masih sangat rendah, bahkan boleh dikatakan sejak satu dasawarsa tidak ada peningkatan yang signifikan. Melihat fenomena tersebut, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang tepat. Pusdiklatwas BPKP (2009 : 12), menjelaskan bahwa unsur kegiatan pengendalian yang dapat diterapkan pada berbagai tingkat organisasi atau semua instansi pemerintah meliputi; a) melakukan rewiw terhadap porestasi kerja pada instansi pemerintah, b) melakukan pembinaan untuk pengembangan pada sumber daya manusia yang dimiliki, c) melakukan tindakan pengawasan terhadap pengelolaan sistem informasi tersedia, d) melakukan pengawasan terhadap fisik dan aset, e) melakukan penetapan dan rewiw terhadap indikator dan ukuran kinerja, f) melakukan pemisahan tehdap fungsi-fungsi yang ada, g) mendukung adanya otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, h) melakukan pencatatan yang akurat serta tepat waktu atas transaksi dan kejadian yang ada, i) Akuntabilitas terhadap sumber daya serta pencatatannya

sekaligus, j) melakukan dokumentasi secara baik atas sistem pengawasan intern serta transaksi dan kejadian penting yang terjadi.

Penerapan unsur atau indikator pengendalian atau pengawasan yang akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan termasuk kualitas pelaporan keuangan desa. Hal ini dapat dilihat pada pembinaan SDM dan pemisahan fungsi. Pembinaan SDM akan mengalami kendala yang disebabkan karena masih adanya aparatur yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensi keilmuannya masing-masing. Di samping itu para auditor mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsinya karena pemisahan fungsi yang belum jelas. Artinya tidak maksimalnya salah satu unsur sistem pengendalian manajemen akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terdiri dari empat karakteristik sebagai prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang diinginkan, yaitu; relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Adanya pemisahan fungsi yang belum jelas yang mengakibatkan tidak maksimalnya salah satu unsur sistem pengendalian intern yang akan berdampak negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, inspektorat daerah di bawah naungan kepala daerah sampai ketinggian paling bawah yaitu pemerintahan desa merupakan wilayah tugas dan tanggung jawabnya, dengan demikian independensi personal atau para auditor dari inspektorat sangat terbatas termasuk dalam hal ini pengawasan terhadap penyusunan pelaporan keuangan negara termasuk dalam

penerapannya tidak dapat mencapai hasil yang efektif sebagaimana tupoksi utama yang diamanakkan sebagai fungsi pengawasan penerapan dan penyusunan pelaporan keuangan instansi *public* (pemerintah) termasuk pengelolaan keuangan desa yang berimplikasi terhadap kualitas pelaporan keuangannya.

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan dasar atau tolok ukur untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan peranan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di antaranya. Risikiyanto Tantu (Analisis persepsi auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pohuwato). Lusy Oktaviana, Surya Raharja (Pengaruh kepemimpinan, kapasitas fungsi akuntansi, peran APIP terhadap kualitas pelaporan keuangan). Komang Widyarini, dkk (Pengaruh Prosedur, Pendidikan, Tekanan dan Anggaran Reviu pada Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Penelitian APIP Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota di Bali). Engelita O Kneefel, dkk (Pengaruh Kode Etik APIP terhadap kinerja auditor pemerintah pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara).

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian; **”Pengaruh penerapan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah desa (Studi Penelitian Kantor Desa Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang dikemukakan, yaitu; **Apakah Penerapan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap**

kualitas pelaporan keuangan pemerintah desa (Studi penelitian Kantor Desa Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato).

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada instansi pemerintah desa (Studi penelitian Kantor Desa Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato) dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah; Untuk melakukan analisis pengaruh Penerapan Pengawasan APIP terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Berbagai manfaat yang dapat dipetik dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk praktisi; yaitu sebagai bahan masukan tentang Penerapan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengaruhnya terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah desa (Studi penelitian Kantor Desa Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato).
2. Untuk akademisi; yaitu sebagai bahan rujukan bagi seluruh sivitas akademik khusus Universitas Ichsan Gorontalo (mahasiswa maupun dosen).
3. Untuk peneliti; yaitu sebagai pembuktian teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah dan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Akuntansi

Secara umum akuntansi dapat di definisikan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang memungkinkan pembuatan kebijakan dan keputusan oleh pemakainya. (L.M. Samryn, 2002).

Kemudian Zaki Baridwan (2000:1), Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan, dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif dari suatu keadaan. Selanjutnya Al. Haryono Yusup (2005:5), mengatakan bahwa Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan dari suatu organisasi.

Pada *Accounting Principle Board* (APB) yang disadur Halim (2001 : 164) memiliki pandangan tentang akuntansi dari dimensi fungsinya adalah : merupakan suatu aktivitas atau kegiatan dalam bentuk jasa. Sedangkan fungsinya yaitu memberikan informasi secara kuantitatif, khususnya dalam bentuk keuangan, tentang entitas di bidang ekonomi dan hal ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap pengambilan suatu keputusan di bidang ekonomi dalam membuat berbagai alternative atau pilihan-pilihan melalui nalar di antara dari berbagai alternatif atau pilihan-pilihan arah dalam melakukan tindakan.

Suwardjono, dalam Ulum (2005 : 2), Akuntansi merupakan : suatu seni dalam melakukan kegiatan pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang memiliki sifat keuangan melalui cara yang berdaya guna dalam ukuran satuan uang, dan menjelaskan hasil daripada proses tersebut.

Dari definisi tersebut di atas maka dapatlah dikatakan bahwa akuntansi adalah merupakan suatu kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan dari suatu organisasi, kegiatan pencatatan dan penggolongan adalah proses yang dilakukan secara rutin dan berulang-ulang setiap kali terjadi transaksi keuangan, sedangkan kegiatan pelaporan dan penganalisaan biasanya hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, kemudian berkembang berbagai ilmu akuntansi seperti akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, pemeriksaan akuntansi, akuntansi pemerintahan, dan sistem informasi akuntansi yang saling terkait dalam implementasinya.

2.1.1. Akuntansi Keuangan Daerah

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian intern yang lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Selain sistem akuntansi yang handal, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, maka diperlukan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah atau secara lebih luas Standar Akuntansi Sektor Publik.

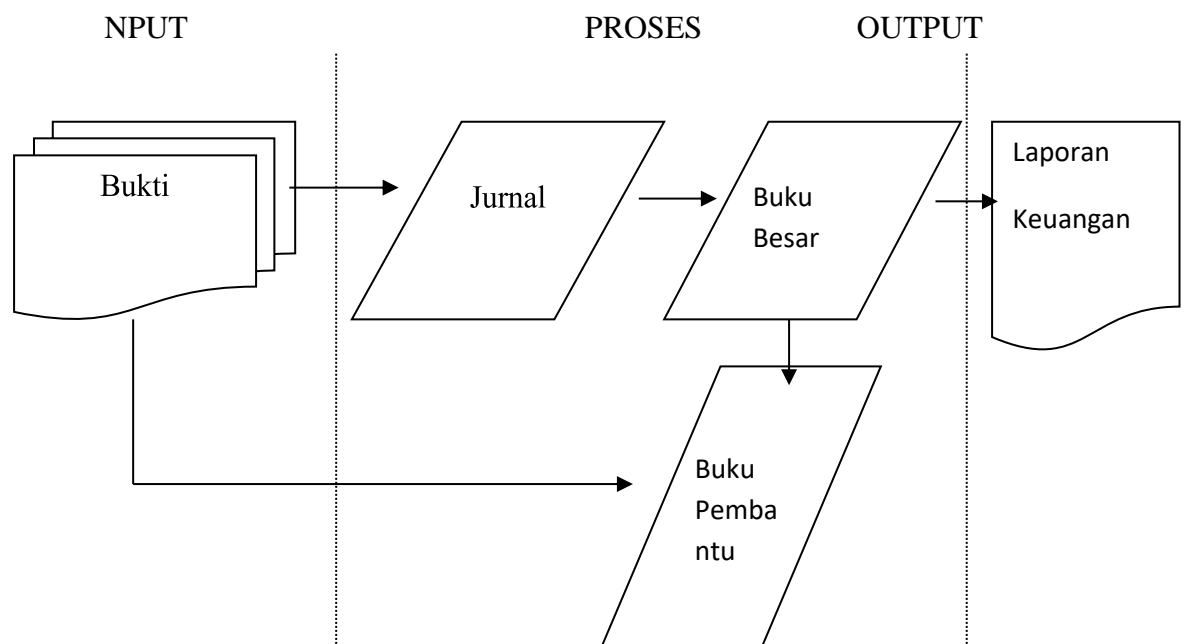
Akuntansi Keuangan Daerah, dalam Halim (2002 : 35), merupakan suatu proses dalam melakukan identifikasi, melakukan pengukuran, melakukan pencatatan, serta melakukan pelaporan transaksi ekonomi dalam bentuk keuangan pada suatu daerah atau wilayah tertentu (baik propinsi, kabupaten, dan maupun kota) yang dijadikan sumber suatu informasi dalam rangka pengambilan suatu keputusan yang terkait tentang ekonomi oleh siapa saja yang memerlukan atau membutuhkan.

Jones & Pendlebury menurut Ulum (2005 : 6), menguraikan tentang sektor publik agar dapat dimengerti dan dipahami lebih jauh apabila dihubungkan dengan makna akuntan publik. Di Amerika Serikat mengenai akuntansi publik ini diperuntukkan bagi para akuntan swasta yang melakukan berpraktekum untuk kepentingan masyarakat atau publik, sementara itu di Inggris akuntansi publik tersebut sebagai akuntan beroperasi untuk instansi pemerintah.

Salah satu bidang sebagai perwujudan otonomi daerah atau otonomi wilayah sebagaimana yang tertuang di dalam UU No. 32 tahun 2004, tentang akuntansi keuangan daerah atau akuntansi public sebagai salah satu bagian akuntansi sektor publik yang menjadi perhatian utama dari semua pihak sejak babak reformasi tahun 1998. Sistem akuntansi keuangan publik yang terdiri dari kegiatan pencatatan, kegiatan penggolongan, kegiatan penafsiran, kegiatan peringkasan transaksi atau kejadian dalam keuangan dalam menjalankan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang dapat diterima dengan baik secara umum.

Akuntansi Keuangan Publik atau Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebagai bagian dalam akuntansi sektor publik atau akuntansi di bidang pemerintahan, sehingga pada akuntansi keuangan daerah meliputi berbagai suatu proses pengidentifikasian, proses pengukuran, proses pencatatan, serta proses pelaporan transaksi-transaksi atau kegiatan-kegiatan dalam ekonomi yang terjadi pada instansi pemerintah daerah yang dilakukan menurut prinsip-prinsip akuntansi yang dapat diterima secara umum. Berikut ini siklus akuntansi seperti Gambar berikut.

Gambar 2.1
siklus akuntansi



Dari gambar di atas, menurut (Sugiri, 2001:13) dalam Abdul Halim (2001:43), dapat dijelaskan, bahwa yang dimaksudkan dengan istilah siklus akuntansi yakni :

- a. Melakukan atau membuat dokumentasi mengenai transaksi keuangan disertai dengan bukti serta melakukan analisis terhadap kegiatan atau transaksi keuangan bersangkutan.

- b. Melakukan pencatatan terhadap kegiatan atau transaksi keuangan dalam bentuk buku jurnal dan pada proses ini biasa disebut menjurnal atau melakukan penjurnalan.
- c. Resume atau melakukan peringkasan, ke dalam bentuk buku besar, transaksi-transaksi atau kegiatan-kegiatan terhadap keuangan yang sudah di jurnal biasa atau umumnya disebut posting.
- d. Menetapkan dalam bentuk saldo-saldo buku besar pada setiap akhir periode dan dituangkan dalam bentuk neraca saldo.
- e. Melakukan penyesuaian dalam bentuk buku besar yang bersumber dari informasi yang *up-to-date*.
- d. menetapkan atau menentukan saldo-saldo buku besar setelah dilakukan penyesuaian dan biasanya terutang dalam bentuk Neraca Saldo Setelah dilakukan Penyesuaian.
- f. Melakukan penyusunan laporan keuangan yang bersumber dari Neraca Saldo Setelah dilakukan penyusunan.
- g. Melakukan penutupan dalam bentuk buku besar.
- h. Menetapkan atau menentukan saldo-saldo dalam buku besar dan dituangkan dalam neraca saldo setelah tutup buku.

Dalam sistem akuntansi keuangan daerah mencakup tiga sub sistem sebagai berikut:

- a. Sub Sistem Akuntansi Umum

Sub sistem akuntansi umum merupakan bagian sistem akuntansi keuangan daerah yang menampung seluruh aktivitas keuangan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Sub sistem ini dijalankan oleh Biro keuangan untuk pemerintah provinsi dan bagian keuangan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota.

b. Sub Sistem Akuntansi Kas Daerah

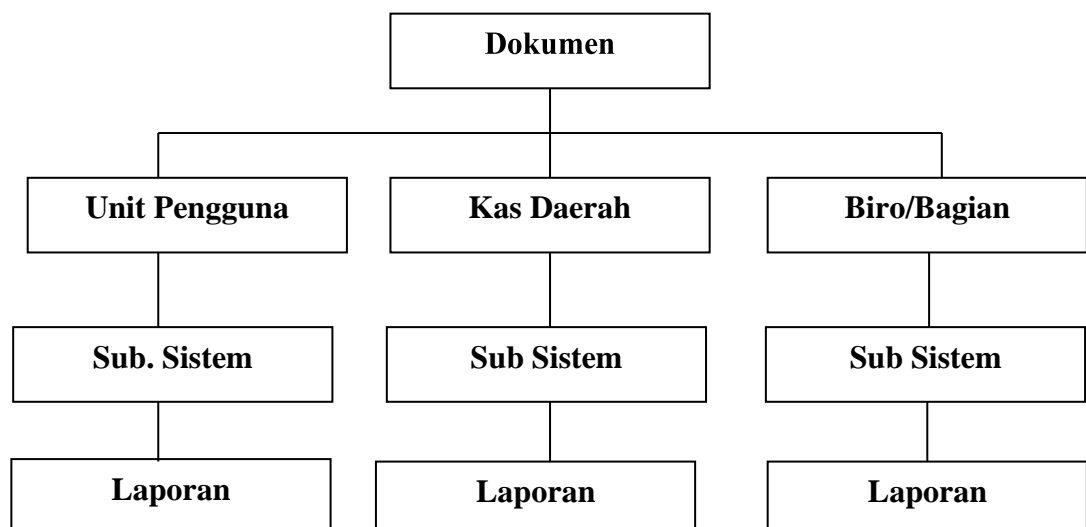
Sub sistem akuntansi kas daerah merupakan bagian sistem akuntansi keuangan daerah yang menampung aktivitas keuangan daerah penerimaan dan pengeluaran kas.

c. Sub Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran

Sub sistem akuntansi pengguna anggaran merupakan bagian dari sistem akuntansi keuangan daerah yang menampung aktivitas keuangan daerah yang dilakukan oleh setiap pengguna anggaran.

Dari tiga sub sistem akuntansi keuangan daerah tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.2
Sub Sistem Akuntansi Keuangan Daerah



2.1.2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi Keuangan Publik atau Akuntansi Keuangan Daerah sebagai salah satu model akuntansi, oleh karena itu pada akuntansi keuangan publik atau akuntansi keuangan daerah yang melakukan suatu rangkaian proses dalam pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi tentang aktivitas ekonomi yang terjadi pada instansi pemerintah daerah (provinsi dan kota/kabupaten).

Menurut Abdul Halim (2004:38), mengemukakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai berikut :

a. Sistem Pencatatan

Sistem atau proses pencatatan yang dipakai pada akuntansi sektor publik atau akuntansi di lingkungan instansi pemerintah merupakan suatu proses double entry, double entry terkadang disebut dengan istilah sistem atau prosedur tata cara pembukuan yang berpasangan. berdasarkan sistem atau metode ini, yang dasarnya merupakan suatu kegiatan transaksi di bidang ekonomi yang akan dilakukan pencatatan sebanyak dua kali. Kegiatan pencatatan dengan sistem atau metode ini dikenal dengan suatu istilah melakukan penjurnalan. Pada kegiatan pencatatan bersangkutan terdapat dua sisi atau bagian yaitu sisi debet dan sisi kredit, pada setiap kali dilakukan pencatatan diharuskan tetap menjaga keseimbangan persamaan dasar-dasar akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Aktiva+Belanja = Utang + Ekuitas Dana + Pendapatan

Sebuah transaksi atau kejadian yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan pada aktiva dapat dicatat atau dimuat pada sisi atau kolom debit sementara itu yang dapat mengakibatkan suatu penurunan terhadap aktiva akan dicatat atau dimuat pada sisi atau kolom kredit, sedangkan kebalikannya dapat dilakukan terhadap utang, ekuitas dana, serta pendapatan. Seandainya dalam transaksi dapat menyebabkan bertambahnya atau meningkatnya utang, maka pencatatan tersebut dapat dilakukan atau dimuat pada sisi atau kolom kredit, sementara itu seandainya dapat menimbulkan berkurangnya pada utang, maka pencatatan dilakukan atau dimuat pada sisi ataupun kolom debit dan begitu juga perlakuannya terhadap pos ekuitas dana serta pendapatan.

Tabel 2.1
Pencatatan Sistem Double Entry

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
1	2	3	4	5	6
..	4xxxxx1010 1	Kas		1.350.000	0
	6xxxxxxx1	Ekuitas dana atau R/K Pemda			1.350.000
12	2xxxxxx206 1	Belanja Pakaian Dinas		1.000.000	0
	4xxxxxx10	Kas (aktiva)			1.000.000

b. Pengakuan/Basis Akuntansi

Setelah mengerti mengenai sistem, maka hal yang sangat mendasar untuk dilakukan adalah pengakuan. Dimaksud dengan pengakuan dalam IAS Framework, dalam Halim (2004 : 38), yaitu suatu pembrosesan memasukkan ke

neraca atau psosisi laporan dan atau laporan rugi laba (dalam konteks akuntansi sektor publik disebut dengan istilah laporan surplus defisit).

Sementara menurut Standar Akuntansi Keuangan, pengakuan ini merupakan suatu proses pembentukan pos-pos yang dianggap memenuhi definisi unsur-unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam Paragraf dalam neraca atau laporan laba rugi. Kriteria pengakuan yang dimaksud tersebut terbagi menjadi 2 bagian yakni kemungkinan manfaat ekonomi yang memiliki hubungan dengan pos tersebut akan mengalir dari dan ke dalam entitas dan Pos tersebut memiliki nilai atau *cost* yang dapat diukur dengan andal atau secara akurat.

Dasar akuntansi yang serinbg digunakan pada akuntansi keuangan daerah diantaranya adalah :

1. Basis Kas.

Basis kas menentukan, bahwa suatu pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dapat dilakukan jika transaksi itu mengakibatkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi tidak menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat.

2. Basis Akrual

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut akan terjadi (bukan hanya pada saat kas atau setara kas tersebut diterima ataupun dibayar). Oleh sebab itu, transaksi dan peristiwa/kejadian tersebut akan dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui atau diterima dalam laporan keuangan pada periode yang terjadi.

c. Standar dan Prinsip Akuntansi

Standar dan prinsip akuntansi merupakan suatu norma atau aturan dalam penerapam yang dapat diterima kebenarannya oleh profesi, dunia bisnis, dan instansi pemerintah yang memiliki pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia kita pihak pemerintah telah menetapkan secara resmi dan jelas tentang standar akuntansi yang terkait dengan sistim pemerintahan yang berlaku dan selanjtnya disebut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kemudian standar tersebut dituangkan dalam bentuk atau istilah standar akuntansi pada sektor atau instansi pemerinta atau publik yang kemudian dimuat dalam bentui rumusan secara terperinci setia bagian-bagian dalam standar akuntansi tersebut.

SAP dirumuskan oleh komite standar akuntansi pemerintahan juga menerbitkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan buletin teknis. Standar akuntansi yang diturunkan dari kerangka konseptual dengan mempertimbangkan kebutuhan yang dapat mendukung terwujudnya good governance sebenarnya. Tiga prinsip utama yang mendasari prinsip good governance adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Laporan keuangan pemerintah disusun dengan berpedoman pada standar akuntansi yang menetapkan prinsip uniformity memudahkan agenda partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Untuk kebutuhan akuntabilitas, para pengguna laporan keuangan terutama mengandalkan perbandingan aspek-aspek khusus pemerintahan dari pada sekedar mengevaluasinya menyeluruh. prosedur dan praktik yang beragam akan menimbulkan kesulitan ketika para pengguna berniat melakukan perbandingan.

Kemudian Mohammad Mahsun, dkk (2006:178-179), berikut ini Sistem Akuntansi Keuangan Daerah meliputi :

1. Alur Perkiraan Standar yang Seragam

Sebuah perkiraan yang dipakai pada unit akuntansi dan mata anggaran operasional anggaran dan penerapan anggaran sama baik itu dalam bentuk klasifikasi akan tetapi istilah ini dapat memastikan, bahwa suatu anggaran serta laporan realisasinya memakai istilah yang pada dasarnya sama, serta meningkatkan kemampuan sistem akuntansi untuk menjadi sumber informasi tentang laporan yang relevan, berarti, serta dapat diandalkan atau terpercaya.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, yang kemudian dinamakan SIAKD, merupakan suatu rangkaian prosedur secara manual maupun dengan sistem komputerisasi mulai dari pengumpulan data tersebut, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan daerah yang bersangkutan.

Alur dalam perkiraan standar dan pemberian kode perkiraan mutlak atau sangat penting untuk kemudian menjadi suatu pedoman dalam suatu kegiatan atau penyelenggaraan pencatatan akuntansi itu sendiri. Sehingga dengan adanya suatu standarisasi perkiraan berikut yang memiliki kode dimana kodenya tersebut lebih memungkinkan perlakuan akuntansi yang sifatnya seragam dan tetap konsisten dengan demikian akan lebih mempermudah dalam proses kegiatan penyusunan laporan keuangan serta kiatan konsolidasi pada tingkat daerah maupun pada ditingkat pusat.

Untuk dapat memenuhi/mendapatkan sebuah kebutuhan bersangkutan, maka dapat dikelompokkan ke dalam suatu perkiraan yang selain berdasarkan pada suatu sistem penganggaran yang lama, yakni setiap Mata Anggaran Penerimaan, maka keseluruhan aktivitas atau kejadian keuangan pada instansi pemerintah daerah mutlak dapat dilakukan perincian yang berdasarkan organisasi tersebut, dengan demikian akan muncul fungsi serta klasifikasi atau pengelompokan ekonomi. Di sisi lain agar dapat secara konsisten dengan penerapan sistem perencanaan strategik tersebut seperti yang dimaksud dalam Impres No. 7 tahun 1999 mengenai suatu laporan kinerja instansi pemerintah, maka klasifikasi rekening pun juga harus mampu dilakukan perincian hingga dapat dengan jelas menggambarkan program dan aktivitas setiap entitas akuntansi.

2. Sistem (Proses) Pencatatan Pembukuan Berpasangan (*Double Entry*)

System atau proses kegiatan pencatatan yang sering digunakan dalam akuntansi keuangan daerah adalah sistem pembukuan berpasangan, suatu pencatatan yang dilakukan secara berpasangan kadangkala juga dikatakan dengan istilah sistem atau metode tata pembukuan yang berpasangan. Berdasarkan cara pencatatan pembukuan berpasangan ini, pada prinsipnya merupakan suatu proses transaksi di bidang ekonomi dan akan dilakukan pencatatan sebanyak dua kali. Pencatatan yang menggunakan seperti sistem atau metode ini sering disebut disebut istilah atau kegiatan menjurnal. Pada kegiatan pencatatan ini terdapat dua sisi atau bagian yaitu bagian debet dan bagian kredit, setiap melakukan kegiatan pencatatan mutlak harus tetap menjaga yang

namanya keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan atau formulasi dasar-dasar akuntansi yakni :

$$\text{Aktiva} + \text{Belanja} = \text{Utang} + \text{Ekuitas Dana} + \text{Pendapatan}$$

Suatu transaksi yang dapat mengakibatkan meningkatnya aktiva dapat dimuat atau dicatat pada sisi atau kolom debit sementara itu yang dapat menimbulkan suatu berakibat kurang atau menurunnya aktiva akan dimuat atau dicatat pada sisi atau kolom kredit.

Tabel 2.2
Sistem pencatatan double Entry

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
1)	(2)	(3)	4)	(5)	(6)
	499999101 01	Kas		9.000.000	0
	677777771	Ekuitas dana atau R/K Pemda			9.000.000
2)	255555520 61	Belanja Pakaian Dinas		8.500.000	0
	44444410	Kas (aktiva)			8.500.000

3. Basis Akuntansi (Pengakuan/Dasar)

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, dasar merupakan suatu proses pembentukan yang merupakan pos yang dapat memenuhi syarat dengan definisi tentang unsur-unsur serta syarat atau kriteria dalam pengakuan dalam laporan keuangan dalam neraca neraca dan laporan rugi laba. Persyaratan atau kriteria

untuk mendapat pengakuan tersebut di bagian dalam dua kemungkinan adalah :

1). Terdapat suatu kemungkinan, bahwa manfaat di bidang ekonomi yang memiliki hubungan yang dikatakan dengan pos akan mengalir ke dalam yang disebut entitas; 2). Pos tersebut memiliki suatu nilai ataupun cost yang dimungkinkan untuk dilakukan pengukuran secara tepat dan dapat diandalkan. Selanjutnya IAS Framework, dalam Halim (2004 : 38), bahwa pengakuan merupakan proses ataupun kegiatan memasukkan ke neraca atau laporan laba rugi (dalam konteks akuntansi sektor publik disebut laporan surplus defisit).

Pada umumnya yang menjadi dasar-dasar dalam akuntansi yang sering digunakan dalam akuntansi keuangan daerah atau akuntansi keuangan publik meliputi :

- a. Dasar atau Basis Kas, memutuskan, bahwa suatu pengakuan/pencatatan transaksi kegiatan ekonomi hanyalah dapat dikerjakan jika kegiatan transaksi itu dapat mengakibatkan suatu perubahan dalam kas. Jika suatu transaksi tidak menyebabkan suatu perubahan terhadap kas, maka transaksi itu tidak dapat dicatat. Basis kas untuk suatu laporan realisasi anggaran merupakan suatu bukti, bahwa pendapatan sudah dapat diakui atau disahkan pada waktu kas tersebut diterima di dalam rekening kas umum negara/daerah dan atau oleh entitas laporan dan belanja dapat diakui saat kas telah dikeluarkan dari sebuah rekening kas umum negara/ daerah atau entitas pelaporan. Entitas laporan tidak dapat memakai istilah laba atau keuntungan. Dalam menentukan sisa pembiayaan suatu anggaran baik itu berlebih ataupun maupun itu berkurang pada tiap periode tergantung dari

pada selisih antara realisasi penerimaan anggaran dan pengeluaran anggaran.

- b. Basis Akrual, merupakan suatu dasar daripada akuntansi yang mengakui transaksi serta kejadian lainnya pada waktu terjadi transaksi dan kejadian itu terjadi. Oleh sebab itu, transaksi ataupun kejadian dapat dimasukkan ke dalam catatan akuntansi dan hal tersebut diakui dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

2.2. Pengawasan atau Pengendalian

Dalam bahasa sehari-hari pengendalian ini lebih umum disebut sebagai suatu pengawasan atau *controlling*. Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya dengan fungsi manajemen lainnya dalam suatu organisasi atau perusahaan.

Robbins dan Coulter 1999 dalam Amirullah, dkk (2004 : 298) mengartikan pengendalian sebagai suatu proses membantu kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.

Stoner, dkk dalam Amirullah (2004 : 298), mendefinikan pengendalian manajemen sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.

Sementara Robert J. Mokler dalam Amirullah (2004 : 298) memberikan pengertian dari pada pengawasan meliputi beberapa langkah. Pengawasam dapat diartikan merupakan usaha secara sistematis untuk dapat menetapkan suatu standar

prestasi melalui sasaran perencanaan, dalam melakukan rancangan terhadap sebuah sistem umpan balik informasi, melakukan perbandingan antara prestasi aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk dapat menetapkan bahwa terdapat penyimpangan atau perbedaan melakukan mengukur signifikansi atau kelayakan suatu penyimpangan, serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk dapat menjamin bahwa semua sumber daya instansi yang digunakan secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.

Untuk auditor intern pada instansi pemerintah dibuat sebuah model untuk dapat membantu atau menolong para pimpinan mulai pada tingkat tertinggi presiden, menteri, kepala lembaga pemerintah non departemen sampai pada tingkat pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, untuk itu standar audit APIP yang dilakukan BPK tidak hanya dialihkan untuk dikerjakan oleh APIP (BPKP, 2008 : 35).

Auditor yang bekerja di lingkungan sektor publik atau instansi pemerintah selain dituntut untuk dapat memenuhi ketentuan atau ketetapan dan peraturan tentang kepegawaian sebagai seorang ASN, maka juga dituntut dapat mentaati yang terkait dengan kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan begitu pula pada Standar Audit APIP (BPKP. 2008 : 1).

Pada setiap ada penugasan bagi audit. Seorang auditor harus mampu menyusun suatu rencana audit secara matang. Rencana audit tersebut sangat diperlukan dalam menjamin atau memastikan, bahwa suatu tujuan audit dapat dicapai secara efisien dan efektif. Untuk dapat melakukan perencanaan auditnya

masing-masing, maka seorang auditor harus menetapkan sasaran, ruang lingkup, metode serta pengalokasian sumber daya yang tersedia.

BPKP sebagaimana yang terdapat dalam modul Penyusunan Program Kerja Auditor (2014 : 1), menguraikan dengan jelas tentang penyusunan Program Kerja Audit (PKA) memiliki beberapa tujuan dan manfaat berikut :

1. Sarana penguasa kepada tim audit,
2. Sarana pengawasan selama pelaksanaan dengan sistem berjenjang dimulai dari pada ketua tim sampai dengan kepada pengendali mutu/kualitas,
3. Pedoman kerja berupa pegangan terhadap auditor.
4. Landasan atau dasar untuk dapat membuat ikhtisar/ringkasan dari pada hasil audit,
5. Memiliki sarana yang jelas untuk mengawasi mutu audit/kualitas.

Dalam PP RI No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah pasal 3 dua hal :

1. SPIP tersebut terdiri pada unsur :
 - a. Lingkungan pengendalian
 - b. Penilaian risiko
 - c. Kegiatan/aktivitas pengendalian
 - d. Suatu Informasi dan komunikasi yang digunakan harus jelas dan
 - e. Pemantuan pengendalian intern.
2. Penerapan atau aplikasi unsur-unsur daripada SPIP seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan secara menyatu dan menjadi elemen integral dari kegiatan instansi pemerintah atau lembaga pemerintah.

Pusdiklatwas BPKP (2009 : 7) menguraikan isi Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 pasal 4, yakni mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk dapat menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang dapat mengakibatkan suatu perilaku yang bersifat positif dan kondusif untuk dapat penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan melalui hal berikut :

1. Penegakan secara integritas serta nilai etika.
2. Komitmen terhadap kompetensi.
3. Kepemimpinan yang kondusif.
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerinta terkait.

Sistem pengendalian manajemen merupakan pengaturan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2009 : 4), bahwa kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur, untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

Pusdiklatwas BPKP (2009 : 12), menjelaskan bahwa unsur kegiatan pengendalian yang dapat diterapkan pada berbagai tingkat organisasi atau semua instansi pemerintah meliputi :

a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan

Untuk menilai efektivitas dan efisiensi operasi instansi pemerintah, maka secara periodik kinerja operasi tersebut direviu untuk membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Jika hasil reviu kinerja menunjukkan capaian atau realisasi tidak sesuai dengan capaian yang seharusnya sesuai dengan tujuan atau standar yang ditetapkan, maka proses dan kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan tersebut harus diperbaiki sesuai dengan kelemahan-kelemahan yang ditemukan.

b. Pembinaan sumber daya manusia

Manusia merupakan sumber daya organisasi yang utama. Organisasi akan berjalan dengan baik, apabila didukung oleh pegawai yang memiliki kompetensi memadai. Oleh karena itu, kompetensi pegawai harus selalu dikembangkan.

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, organisasi semakin tergantung dengan sistem informasi terkomputerisasi dalam menjalankan operasi, memroses, memelihara dan melaporkan informasi penting. Akibatnya, keandalan dan keamanan data terkomputerisasi dari sistem yang memroses, memelihara dan melaporkan data tersebut menjadi perhatian utama baik manajemen maupun auditor organisasi

d. Pengendalian fisik dan aset

Instansi pemerintah harus membangun pengendalian fisik dan aset untuk mengamankan dan menjaga aset yang rawan dari risiko kehilangan atau penggunaan tanpa otorisasi. Pengendalian fisik mencakup antara lain pengamanan dan pembatasan akses aset.

- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. Pemisahan fungsi;
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya;
- j. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

2.3. Kualitas Pelaporan Keuangan

Kasmir (2008 : 6) bahwa, bagi suatu perusahaan, penyajian laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajer keuangan. Terkait dengan hal tersebut, maka tugas mereka dalam perusahaan, yaitu :

- 1. Merencanakan,
- 2. Mencari
- 3. Memanfaatkan dana dari perusahaan, dan
- 4. Memaksimalkan nilai perusahaan.

Laporan keuangan merupakan hal yang mutlak bagi perusahaan untuk dilaporkan pada periode tertentu dan menjadi tolok ukur berhasil tidaknya perusahaan/organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kasmir (2008 : 7), menjelaskan, bahwa laporan keuangan merupakan suatu laporan laporan yang menunjukkan tentang kondisi atau keadaan keuangan instansi saat ini ataupun pada suatu waktu periode tertentu. Sedangkan Munawir (2004 : 2), memberikan definisi tentang laporan keuangan sebagai hasil dari sistem atau proses akuntansi sehingga dapat dimanfaatkan menjadi alat dalam melakukan komunikasi antara data keuangan ada atau kejadian dalam organisasi dengan pihak-pihak yang memiliki keperluan terhadap data atau kejadian organisasi yang bersangkutan. pihak-pihak yang berkepentingan dimaksud adalah : para pemilik perusahaan, manajer perusahaan yang bersangkutan, para kreditur, bankers, para investor, dan pemerintah di mana perusahaan tersebut berdomisili, buruh dan lainnya.

Pengertian laporan keuangan menurut Kamaludin (2011 : 34) adalah hasil akhir dari suatu proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Setiap Satuan kerja perangkat daerah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah. Penyampaian informasi tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Mas'ud (2009:9), mengemukakan bahwa Kewajiban laporan keuangan harus memenuhi karakteristik laporan keuangan sebagai berikut;

- a. Harus relevan dengan kebutuhan para pemakai laporan keuangan.
- b. Harus dapat dimengerti oleh para pemakai laporan keuangan
- c. Harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama

- d. Harus diarahkan kepada kebutuhan umum para pemakai laporan keuangan dan tidak memihak kepada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu
- e. Harus tepat waktu (dini), sehingga tidak menunda pengambilan keputusan ekonomi pemakai laporan keuangan.
- f. Harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya milik perusahaan yang sama, atau dengan laporan keuangan perusahaan lainya pada periode yang sama.

Harus mengungkapkan semua fakta dan informasi tambahan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi para pemakai laporan keuangan dan pengungkapan tidak menyesatkan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor. 71 tahun 2010 (2011 : 10) mengeni suatu Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa syarat-syarat atau karakteristik yang harus dipenuhi dalam suatu laporan keuangan yakni ukuran-ukuran yang bersifat normatif yang mutlak diadakan dalam suatu informasi akuntansi sehingga dapat terpenuhi daripada tujuan yang ada. Kemudian dengan alasan tersebut, maka butuhkan suatu prasyarat yang bersifat normatif yang dibutuhkan sehingga dalam laporan keuangan pemerintah atau laporan keuangan publik sesuai dengan kualitas yang persyaratkan diantaranya adalah harus memiliki relevansi, dapat diandalkan, serta dapat dilakukan dibandingkan dan selanjutnya dapat dimengerti dengan mudah.

Selanjutnya Darise (2006 : 248), mendeskripsikan, bahwa keakuratan merupakan suatu langkah yang dapat mencerminkan suatu ketelitian, kecermatan, dan ketepatan yang sangat mutlak. Pengertian kata relevan itu snediri adalah

merupakan suatu kondisi yang sifatnya objektif sampai pada masa masa yang datang. Sementara istilah "dipertanggungjawabkan" merupakan suatu keadaan atau fakta yang dapat dilakukan perbandingan melalui angka-angka yang sifatnya nominal secara matematis.

Pada bagian laporan pertanggungjawaban keuangan keuangan publik di masing-masing SKPD menyampaikan informasi bermanfaat terhadap para pemakai dalam melakukan penilaian akuntabilitas serta mengambil sebuah keputusan baik sebagai keputusan di bidang ekonomi, sosial, maupun pada bidang politik melalui berbagai cara diantaranya :

- a. Menyediakan suatu informasi tentang kecukupan penerimaan dalam suatu periode yang berjalan untuk melakukan pembiayaan terhadap semua pengeluaran atau belanja.
- b. Menyediakan suatu informasi terhadap kesesuaian dengan cara mendapatkan sumber-sumber daya ekonomi serta pengalokasiannya, oleh karena itu suatu anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan dan tercapai secara maksimal.
- c. Menyediakan suatu informasi tentang total sumber-sumber daya ekonomi yang dipakai untuk kegiatan entitas pelaporan dan hasil-hasilnya yang telah tercapai.

2.3.1. Karakteristik kualitatif pelaporan keuangan

Syarat-syarat atau karakteristik suatu kualitatif pelaporan keuangan meliputi suatu standard atau ukuran-ukuran secara normatif yang harus diperhatikan di dalam suatu informasi akuntansi, maka dengan demikian dapatlah memenuhi tujuannya secara efektif. Pada dasarnya terdapat empat karakteristik yang

menjadi prasyarat secara normatif yang dibutuhkan sehingga laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan memenuhi kualitas yang diharapkan adalah; relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

1. Relevan

Suatu pelaporan keuangan dapat dikategorikan relevan jika informasi yang dimuat di dalamnya dapat mempengaruhi suatu keputusan kepada pengguna dengan hal membantu untuk melakukan evaluasi terhadap sebuah peristiwa atau kejadian pada masa yang lalu ataupun di masa sekarang,

Suatu informasi akuntansi yang dapat dikategorikan sudah relevan jika dapat memiliki beberapa syarat yang telah ditetapkan antara lain :

- a. Informasi mutlak memiliki manfaat sebagai umpan balik
- b. Informasi harus memiliki manfaat prediktif atau peramalan
- c. Informasi tersebut harus tepat waktu
- d. Informasi tersebut harus lengkap

2. Andai

Suatu pelaporan keuangan dapat dikategorikan andal seandainya informasi yang dimuat didalamnya terbebas dari makna yang dapat menyesatkan dan ataupun kesalahan material, dapat menyajikan suatu fakta yang teruji kejujurannya dan dapat dilakuakn verifikasi.

3. Dapat dibandingkan

Suatu Informasi yang dihasilkan dalam suatu pelaporan keuangan menjadi lebih bermanfaat jika seandainya dapat diperbandingkan dengan pelaporan keuangan pada periode-periode sebelumnya.

4. Dapat dipahami

Suatu informasi yang dapat disajikan dalam pelaporan keuangan dapat dengan mudah dipahami oleh pihak-pihak atau para pengguna dan dikatakan dalam model serta istilah yang telah disesuaikan dengan batas-batas pemahaman para pengguna.

2.3.2. Elemen-Elemen dalam Laporan Keuangan

Informasi tentang keuangan yang biasa disajikan serta disampaikan melalui BPK serta Aset Daerah yang meliputi antara lain : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan realisasi APBD termasuk didalamnya adalah perubahannya, Neraca atau laporan posisi keuangan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, Laporan keuangan perusahaan daerah, dan data yang berhubungan dengan keperluan fiskal dan kepastian fiskal daerah. Dalam PP No. 71 tahun 2010 dalam bentuk Standar Akuntansi Pemerintahan atau Akuntansi Public, bahwa elemen-elemen laporan keuangan pemerintah tersebut meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran, laporan yang di dalamnya menyajikan ikhtisar sumber anggaran, alokasi anggaran dan penggunaan faktor-faktor ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dapat menguraikan suatu perbandingan antara realisasi anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan tertentu.

- b. Neraca, merupakan suatu laporan yang dapat mendeskripsikan ke dalam suatu posisi keuangan dalam bentuk entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- c. Laporan arus kas, merupakan suatu laporan yang dapat menyajikan informasi tentang kas yang memiliki hubungan dengan kegiatan-kegiatan operasional, investasi aset yang bukan dalam bentuk keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
- d. Catatan atas laporan keuangan, adalah sebagai laporan yang terdiri dari catatan dan penjelasan dalam model narasi atau rincian dari pada angka-angka yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran, Neraca, dan laporan arus kas.

2.4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan fungsi pengawasan APIP dan pelaporan keuangan instansi adalah sebsagai berikut.

1. Risikiyanto Tantu “STIE Ihcsan Pohuwato dengan judul penelitian Analisis persepsi auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pohuwato. Hasil analisis data adalah berdasarkan analisis data sebagaimana tertera pada tabel di atas, rata-rata setiap item indikator kualitas laporan keuangan yang dihasilkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato sebesar 68,17 dan masuk dalam kategori besar. Hal tersebut mendeskriptifkan, bahwa kualitas laporan keuangan pada Rumah Sakit Umum Saerah Kabupaten Pohuwato menurut persepsi auditor internal masuk dalam kategori baik (efketif).

2. Pengaruh kepemimpinan, kapasitas fungsi akuntansi, peran APIP terhadap kualitas pelaporan keuangan. Model penelitian dan hipotesis telah diuji dengan model persamaan struktural kuadrat terkecil parsial (SEM PLS) dan dianalisis dengan menggunakan software smart PLS 3.2.9 dengan 226 sampel yang diperoleh dari satuan kerja dari BPS di seluruh Indonesia dengan responden yakni pegawai yang bidangnya menjalankan fungsi akuntansi atau yang menyusun pelaporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan dan peran APIP berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas, kepemimpinan, kapasitas fungsi akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas, kepemimpinan, kapasitas fungsi akuntansi. Peran APIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan serta kualitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.

Sumber : (Lusy Oktaviana, Surya Raharja, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2021). Jurnal APIP terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. UNDIP Bandung.

3. Pengaruh Prosedur, Pendidikan, Tekanan dan Anggaran Reviu pada Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Penelitian APIP Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota di Bali). Metode Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur reviu, latar belakang pendidikan dan anggaran dana reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD, tekanan waktu penugasan dan kompleksitas tugas yang tinggi maka inspektorat daerah diharapkan agar mengoptimalkan pengaturan penugasan antara anggaran waktu dan kompleksitas tugas agar risiko penurunan kualitas reviu rendah.

Sumber : Komang Widyarini, dkk, 2016 Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana 455-488, 2016 Penerbit Universitas Udayana Bali.

4. Pengaruh Kode Etik APIP terhadap kinerja auditor pemerintah pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Hasil pengujian hipotesis pertama menjelaskan integritas tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah. Pengujian hipotesis kedua, bahwa objektivitas berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah. Pengujian ketiga, bahwa kerahasiaan tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah . pengujian keempat. Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah. Secara simultan integritas, kerahasiaan dan kmpetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah pada Inspektorak Provinsi Maluku Utara.

Sumber : Engelita O Kneefel, dkk, 2017 Pengaruh Kode Etik APIP terhadap kinerja auditor pemerintah pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara, Penerbit Going Concern, Jurnal Riset Akuntansi 12 (2), 2017, Unsrat Manado.

2.5. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran umum variabel dan indikator penelitian. Pada penelitian ini, terdapat dua variabel yang diteliti yaitu, sistem pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan kualitas laporan keuangan. Pusdiklatwas BPKP (2009 : 12), menjelaskan bahwa unsur kegiatan pengendalian yang dapat diterapkan pada berbagai tingkat organisasi atau semua instansi pemerintah meliputi; a) melakukan reviw terhadap porestasi kerja pada instansi pemerintah, b) melakukan pembinaan untuk pengembangan pada sumber daya manusia yang dimiliki, c) melakukan tindakan pengawasan terhadap

pengelolaan sistem informasi tersedia, d) melakukan pengawasan terhadap fisik dan aset, e) melakukan penetapan dan rewiw terhadap indikator dan ukuran kinerja, f) melakukan pemisahan tehdap fungsi-fungsi yang ada, g) mendukung adanya otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, h) melakukan pencatatan yang akurat serta tepat waktu atas transaksi dan kejadian yang ada, i) Akuntabilitas terhadap sumber daya serta pencatatannya sekaligus, j) melakukan dokumentasi secara baik atas sistem pengawasan intern serta transaksi dan kejadian penting yang terjadi.

Variabel kualitas laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 mengenai dasar Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terbagi menjadi empat karakteristik yang merupakan persyaratan secara normatif yang dibutuhkan, sehingga laporan keuangan pemerintah memiliki sntadar kualitas seperti yang menjadi diinginkan sistem, diantaranya; memiliki relevan, dapat diandalkan, dapat diperbandingkan serta mudah dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran



2.6. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis adalah ; **Penerapan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah desa (Studi penelitian Kantor Desa Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato).**

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah Penerapan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah desa (Studi penelitian Kantor Desa Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato). Waktu dibutuhkan untuk merampungkan penelitian adalah \pm tiga bulan.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain penelitian

Husain Umar (2002 : 36), memberikan gambaran tentang desain dalam penelitian merupakan kegiatan perencanaan kerja yang teratur dan secara menyeluruh tentang keterkaitan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Variabel yang disusun tersebut merupakan hasil penelitian dapat memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang muncul dalam penelitian.

Dalam penelitian ini diuraikan tentang pengaruh dan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya, yaitu penerapan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan kualitas laporan keuangan dengan metode kuantitatif, yaitu analisis regresi dan korelasi sederhana.

3.2.2. Operasionalisasi variabel Penelitian

Variabel-variabel yang dimaksud pada penelitian ini adalah pengawasan APIP sebagai variabel bebas (X). Sedangkan variabel terikat (Y) adalah kualitas pelaporan keuangan.

Operasionalisasi variabel penelitian diharapkan dapat mempermudah para pembaca untuk memahami dan mengidentifikasi setiap variabel dan indikator-indikator berikut.

Tabel 3.3
Operasionalisasi Variabel Pengawasan APIP

Variabel	Indikator	Skala
Pengawasan APIP (X)	a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. b. Pembinaan sumber daya manusia. c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi. d. Pengendalian fisik dan aset. e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja. f. Pemisahan fungsi. g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting. h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. i. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. j. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.	Ordinal

Sumber : Pusdiklatwas BPKP, 2009.

Tabel 3.4
Operasionalisasi Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	1. Relevan	a. Mempengaruhi keputusan b. Memiliki umpan balik c. Memiliki manfaat prediktif d. Tepat waktu e. Lengkap f. Bebas dari kekeliruan	Ordinal
	2. Andal	a. Bebas dari kesalahan material b. Bebas dari pengertian yang menyesatkan c. Jujur d. Diverifikasi e. Menguntungkan f. Sesuai kebutuhan	Ordinal
	3. Dapat dibandingkan	a. Dibandingkan dengan periode sebelumnya b. Dibandingkan secara internal c. Dibandingkan secara eksternal d. Berguna	Ordinal
	4. Dapat dipahami	a. Dipahami oleh pengguna b. Pengguna memiliki kemauan untuk mempelajari informasi keuangan	Ordinal

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner atau angket. sedangkan untuk pemberian bobot atau skor terhadap setiap pilihan atau alternatif-alternatif terhadap kuisioner atau angket yang mengacu pada skala likert. Husain Umar (2002 : 98), mengemukakan suatu pendapat, bahwa skala likert memiliki kaitan dengan pernyataan atau pernyataan mengenai sikap atau pandangan seseorang terhadap sesuatu kejadian. Jika pilihan atau alternatif pernyataan, seperti mulai dari sangat setuju sampai tidak setuju, sangat senang sampai tidak senang, sangat puas sampai tidak puas ataupun sangat baik sampai tidak baik.

Tabel 3.5
Bobot Alternatif Skala Likert

Pilihan	Bobot
Sangat tinggi	5
Tinggi	4
Sedang	3
Rendah	2
Sangat rendah	1

Sumber : Husain Umar, 2002.

3.2.3. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan

Bertujuan untuk mengumpulkan berbagai literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara; (1) interview, (2) dokumentasi dan (3) kuisioner,

3.2.4. Jenis dan Sumber Data

3.2.4.1. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan untuk dapat merampungkan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang umumnya bersumber dari lokasi penelitian berupa data utama yang akan dianalisis, dalam hal ini data yang diperoleh melalui pembagian angket atau kuisioner kepada responden.
2. Data sekunder, yaitu data kedua dan berfungsi sebagai data pendukung dalam memecahkan pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

3.2.4.2. Jenis Data

Pada dasarnya jenis data dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni:

1. Data kualitatif adalah data yang biasanya berwujud narasi atau kalimat dan atau pernyataan-pernyataan yang sifatnya tidak bisa dihitung.
2. Data kuantitatif adalah data yang umumnya berupa angka-angka atau nilai-nilai, tabel, maupun dalam bentuk grafik yang sifatnya dapat dihitung.

3.2.5. Populasi dan Sampel

3.2.5.1. Populasi

Widayat, dkk (2002 : 52) mengemukakan, bahwa populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum yang dari bidang-bidang untuk diteliti.

Jumlah populasi yang akan dijadikan responden pada penelitian ini adalah aparat desa Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato yang berjumlah 79 orang. Populasi yang dimaksud disini adalah aparat desa yang mengetahui tentang permasalahan yang diteliti dan turut terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu kepala desa, sekretaris, bendahara dan kasi bidang pembangunan (pelaksana kegiatan).

Jumlah desa Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato adalah 7 desa, dengan demikian jumlah populasi 79 orang sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Daftar Nama-Nama Populasi Penelitian

No.	Instansi	Nama	Tupoksi	Ket.
1	Desa Teratai	Simson Hasan, SH	Kepala Desa	Aktif
2		Alwin Suleman, SE	Sek. Desa	Aktif
3		Fitrianti Diange, S. Ip	Kasie Pemerintahan	Aktif
4		Marten Hamzah	Kasie Kesejahteraan	Aktif
5		Resta Rahman, S. Ip	Kasie Pelayanan	Aktif
6		Santi Manggas	Kaur TU & Umum	Aktif
7		Hariyati Hionu, S. Ip	Kaur Keuangan	Aktif
8		Hajira Kadir, SP	Kaur Perencanaan	Aktif
9		Melinda Lamundu, S. Kom	Operator Profil Desa	Aktif
10		Nurlena Bakari, S. Kom	Operator Siskeudes	Aktif
11		Nizam Tino	Kadus Moduito	Aktif
12		Adrianto Deange	Kadus Bihe	Aktif
13		Abdurahman Musa, S. Ip	Kadus Dupi	Aktif
14		Guslan Kadir, S. Ip	Kadus Hulangato	Aktif
15		Jeni Deyala, SE	Kadus Mekar Jaya	Aktif
16	Desa Palopo	Ely Djafar, S. I]	Kepala Desa	Aktif
17		Yunus Musa	Sekdes	Aktif
18		Melinda Sari	Kaur Keuangan	Aktif
		Wiwini Lahay, SP	Kesra	Aktif
		Lani Lantik Sakula, SE	Kaur Pelayanan	Aktif
21		Tasni Dunggio, SE	Kaur Umum	Aktif
22		Hartati Pakaya, SE	Kaur Pemerintahan	Aktif
23		Agus Hasan	Kaur Perencanaan	Aktif
24	Desa Marisa Utara	Iwan Kadir	Kepala Desa	Aktif
25		Inang Dayd	Sekdes	Aktif
26		Rahmat Y. Kiu, A. Md	Kasie Pemerintahan	Aktif
27		Ais Sabu, SE	Kesra	Aktif
28		Alfiah, SE	Kasie Pelayanan	Aktif

29		Hasna Uloli	Kaur Umum	Aktif
30		Maman Anwar	Kaur Perencanaan	Aktif
31		Nova Uloli, SE	Kaur keuangan	Aktif
32		Zainal Abidin Biga	Kadus Batu Pasang	Aktif
33		Sri Nining Nipi	Kadus Melati	Aktif
34		Moh. Faturahman Sabu, SE	Kadus Anggret	Aktif
35		Gusti Lukum	Kadus Sulalo	Aktif
36		One Mbuinga, SE	Kepala Desa	Aktif
37	Desa Botubilatahu	Asma Podungge, SE	Sekdes	Aktif
38		Irmayanti T. Nunu, SE	Kaur Keuangan	Aktif
39		Indra Adam	Kaur Kesra	Aktif
40		Halma Sadaku	Kasie Pelayanan	Aktif
41		Silawati Mbuinga	Kaur Umum	Aktif
42		Fitriyanti Tahir, S. Pd	Kaur Permerintahan	Aktif
43		Liun Hilalaingo, S. Ip	Kaur Perencanaan	Aktif
44		Sahrianto Lamapa, SE	Kepala Desa	Aktif
45	Desa Pohuwato	Muhamad Husin, S. Pd, I	Sekdes	Aktif
46		Sri Wahyuni N. Katili, S. Pd	Kaur TU & Umum	Aktif
47		Yulianti Ibrahim, SE	Kaur Keuangan	Aktif
48		Sri Nelantika Saleh, S. Ip	Kaur Perencanaan	Aktif
49		Ariani, SE	Kasie pelayanan	Aktif
50		Noviana N. Mohi, I. Pd	Kasie Kesejahteraan	Aktif
51		Suhelmi Poha	Kasie Pemerintahan	Aktif
52		Hairun N. Talib	Kadus Kramat	Aktif
53		Yunan Pomili	Kadus Andalas	Aktif
54		Lisna Dalanggo	Kadus Bina Karya	Aktif
55	Desa Marisa Selatan	Hendra Imbran, SH	Kepala Desa	Aktif
56		Jhon Ibrahim	Sekdes	Aktif
57		Rikman Kasim	Kasie Pemerintahan	Aktif
58		Imran Monoarfa	Kasie Kesejahteraan	Aktif
59		Maspa Lasiama	Kasie Pelayanan	Aktif
60		Sri Lista Hamid, S. Pd	Kaur TU & Umum	Aktif
61		Astin Kadir, A. Md	Kaur Keuangan	Aktif
62		Hasan Larauf, SP	Kaur Perencanaan	Aktif
63		Ridwan Makmur	Kadus Teratai	Aktif
64		Abdul Ajis Ismail	Kadus Melati	Aktif
65		Hasan Inombi	Kadus Bakia	Aktif
66		Ilyas Olii	Kadus Beringin	Aktif
67	Desa Pohuwato Timur	Riska Ismail	Kepala Desa	Aktif
68		Bayu M. Abdullah, SE	Sekdes	Aktif
69		Sukmawati Rivai	Kasie Pemerintahan	Aktif
70		Rian Gintulangi, Sp	Kasie Kesejahteraan	Aktif
71		Hijra Tangahu, SE	Kasie Pelayanan	Aktif
72		Linda Thalib	Kaur TU & Umum	Aktif
73		Ysriani AKuba, SE	Kaur Keuangan	Aktif
74		Meyke Lahay, SP	Kaur Perencanaan	Aktif
75		Anugra Idji	Staf Kantor Desa	Aktif
76		Siti Nurain Ladiku	Operator Simkeudes	Aktif
77		Aswin HUsa	Kadus Siku	Aktif
78		Sandi Katili, SE	Kadus Wulungio	Aktif
79		Rini A. Mamestu	Kadus Milango	Aktif

Sumber : Kantor Desa Sekecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, 2022

3.2.5.2. Sampel

Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi sebagai wakil dari keseluruhan populasi. Pada penelitian ini penarikan sampel menggunakan sistim sampel jenuh yaitu keseluruhan populasi akan dijadikan sampel yang berjumlah 35 orang.

Tabel 3.7
Daftar Nama-Nama Responden Penelitian

No.	Instansi	Nama	Tupoksi	Ket.
1	Desa Teratai	Simson Hasan, SH	Kepala Desa	Aktif
2		Alwin Suleman, SE	Sek. Desa	Aktif
3		Fitrianti Diange, S. Ip	Kasie Pemerintahan	Aktif
4		Santi Manggas	Kaur TU & Umum	Aktif
5		Hariayati Hionu, S. Ip	Kaur Keuangan	Aktif
6	Desa Palopo	Ely Djafar, S. I[Kepala Desa	Aktif
7		Yunus Musa	Sekdes	Aktif
8		Melinda Sari	Kaur Keuangan	Aktif
9		Tasni Dunggio, SE	Kaur Umum	Aktif
10		Hartati Pakaya, SE	Kaur Pemerintahan	Aktif
11	Desa Marisa Utara	Iwan Kadir	Kepala Desa	Aktif
12		Inang Dayd	Sekdes	Aktif
13		Rahmat Y. Kiu, A. Md	Kasie Pemerintahan	Aktif
14		Hasna Uloli	Kaur Umum	Aktif
15		Nova Uloli, SE	Kaur keuangan	Aktif
16	Desa Botubilatahu	One Mbuinga, SE	Kepala Desa	Aktif
17		Asma Podungge, SE	Sekdes	Aktif
18		Irmayanti T. Nunu, SE	Kaur Keuangan	Aktif
19		Silawati Mbuinga	Kaur Umum	Aktif
20		Fitriyanti Tahir, S. Pd	Kaur Permerintahan	Aktif
21	Desa Pohuwato	Sahrianto Lamapa, SE	Kepala Desa	Aktif
22		Muhamad Husin, S. Pd, I	Sekdes	Aktif
23		Sri Wahyuni N. Katili, S. Pd	Kaur TU & Umum	Aktif
24		Yulianti Ibrahim, SE	Kaur Keuangan	Aktif
25		Suhelmi Poha	Kasie Pemerintahan	Aktif
26	Desa Marisa Selatan	Hendra Imbran, SH	Kepala Desa	Aktif
27		Jhon Ibrahim	Sekdes	Aktif
28		Rikman Kasim	Kasie Pemerintahan	Aktif
29		Sri Lista Hamid, S. Pd	Kaur TU & Umum	Aktif
30		Astin Kadir, A. Md	Kaur Keuangan	Aktif

31	Desa Pohuwato Timur	Riska Ismail	Kepala Desa	Aktif
32		Bayu M. Abdullah, SE	Sekdes	Aktif
33		Sukmawati Rivai	Kasie Pemerintahan	Aktif
34		Linda Thalib	Kaur TU & Umum	Aktif
35		Ysriani AKuba, SE	Kaur Keuangan	Aktif

Sumber : Kantor Desa Sekecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, 2022

3.2.6. Metode Analisis Data

3.2.6.1. Uji Validitas

Arikunto (2001 : 219) menjelaskan; validitas adalah salah satu standar yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen penelitian yang mampu mengukur apa yang diukur.

Sedangkan sugiyono (2019 : 312) menjelaskan, bahwa instrumen yang dianggap valid adalah alat ukur yang dipakai untuk mendapatkan data itu valid. Jika pernyataan atau hasil yang didapatkan valid, maka instrumen tersebut dapat digunakan. Adapun formulasi uji validitas adalah :

$$r_{XY} = \frac{n\sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n\sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

3.2.6.2. Uji Reliabilitas

Reliable artinya dapat yang diperoleh dapat dipercaya atau andal. Artinya alat yang digunakan untuk mengumpulkan dapat memang tepat dan hasilnya dapat dipercaya atau diandalkan kebenarannya.

Sugiyono (2019 : 354) menjelaskan bahwa instrument yang reliable adalah instrumen yang jika dipakai untuk mengukur obyek beberapa kali dan hasilnya tetap sama atau tetap mendapatkan hasil yang sama, dengan demikian instrumen tersebut reliable atau terpercaya.

Formulasi uji reliabilitas adalah :

$$R_i = \frac{2r_b}{1 + r_b}$$

3.2.6.3. Uji Asumsi Klasik

Untuk memecahkan masalah pokok dan membuktikan hipotesis, maka metode analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, yaitu metode analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel pengawasan APIP terhadap variabel kualitas pelaporan keuangan. Adapun persamaan regresi sederhana adalah : $Y = a + bX + \varepsilon$

Dimana :

ε = Standar error atau variabel yang tidak diteliti.

Y = Kualitas laporan keuangan.

a = Nilai konstant atau nilai tetap.

B = Parameter (koefisien variabel)

X = Sistem pengendalian manajemen.

3.2.6.4. Uji Korelasi

Analisis ini digunakan untuk mengukur korelasi atau besar hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{XY} = \frac{n\sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n\sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Dimana :

r_{XY} = Besarnya hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

n = Banyaknya populasi yang akan dijadikan responden.

Arti harga korelasi (r) akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r sebagai berikut.

Tabel 3.8
Interpretasi Koefisien Nilai r

Interpretasi validitas (r)	Keterangan
0,80 - 1,000	Sangat Tinggi
0,60 - 0,799	Tinggi
0,40 - 0,599	Sedang
0,20 - 0,399	Rendah
0,00 - 0,199	Sangat Rendah

Sumber : Riduwan, 2004

3.2.6.5. Uji signifikan

Uji signifikan hubungan (r) untuk secara parsial atau korelasi sederhana digunakan rumus uji t sebagai berikut :

$$t = r \sqrt{\frac{n - 1}{1 - r^2}}$$

Dimana :

t = Koefisien Korelasi

r = Besarnya sampel

n = Jumlah responden

r² = Koefisien determinan

Pada uji signifikan untuk korelasi (r), kesimpulan dapat ditarik dengan membandingkan antara t. hitung dengan t. tabel. Apabila t. hitung yang diperoleh lebih besar dari pada taraf signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian adalah signifikan atau hipotesis diterima, sebaliknya jika t. hitung lebih

kecil dibandingkan dengan taraf signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan tidak signifikan hipotesis ditolak.

Taraf kesalahan ditetapkan untuk menguji kelayakan adalah $\alpha = 1\%$ dengan tingkat kebebasan (df) adalah $n - 2$. Penerapan rumus regresi sederhana, korelasi sederhana dan uji signifikan dilakukan dengan memakai program SPSS.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

A. Desa Marisa Selatan

Desa Marisa Selatan yang berdiri padatahun 1935 yang biasa disebut Kampung Marisa terdiri atas Wilayah Marisa Utara, Pohuwato, Pohuwato Timur dan Palopo. Marisa Selatan mempunyai struktur tanah yang labil karena dekat daerah pantai. Hal ini yang menyebabkan lahan di Desa Marisa Selatan tidak cocok untuk pertanian. Bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat desa adalah Bahasa Gorontalo dan Bahasa Indonesia dan ini disebabkan penduduknya multi etnis. Seperti suku jawa, sunda, bugis, dan gorontalo dan kesemua suku ini dapat hidup damai dan rukun.

Desa ini dikenal dengan Desa yang subur dan tumbuhan yang menghijau di atas tanahnya yang terkenal di Provinsi Gorontalo. Sekelompok masyarakat yang rukun dan damai ,meskipun masih dalam kondisi kehidupan yang sangat ekonomis, bias menciptakan keharmonisan dalam bermasyarakat.

Desa Marisa Selatan awalnya termasuk dalam wilayah Kec. Marisa di sebelah utara berbatasan dengan Desa Marisa Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pohuwato dan Pohuwato Timur, sebelah timur berbatasan dengan Desa Palopo. Dan Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Marisa.

Sampai sekarang keharmonisan antar warga dan sistem pemerintahan berjalan dengan baik. Jumlah penduduk Desa Marisa Selatan adalah sebanyak 3.559 jiwa. Sejak tahun 2008 Desa Marisa Selatan oleh Bapak Hendra Imran sampai sekarang.

B. Desa Pohuwato

Desa Pohuwato merupakan salah satu desa yang terletak di ibukota Kabupaten Pohuwato tepatnya di Kecamatan Marisa. Terbentuknya Desa Pohuwato pada tahun 1986 dan dihuni oleh beberapa suku. Di antaranya adalah suku bugis, tionghoa, jawa dan gorontalo, namun mayoritas desa ini dihuni oleh suku gorontalo.

Sebelum era otonomi daerah, desa ini merupakan bagian dari kabupaten Gorontalo. Pada tahun 1999, kabupaten Gorontalo dimekarkan menjadi dua kabupaten dan Desa Pohuwato bagian dari wilayah Kabupaten Boalemo. Pada tahun 2003 kabupaten Boalemo dimekarkan kembali dan desa Pohuwato menjadi masuk Wilayah Kabupaten Pohuwato.

Sejak mulai tahun 2007, Desa Pohuwato terbagi menjadi 2 wilayah administrasi yakni Desa Pohuwato Timur yang terletak di bagian Timur dan Desa Pohuwato yang terletak di bagian barat yang hanya di batasi dengan jalan sebagai perbatasan antara dua Desa tersebut. Desa Pohuwato sendiri terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Kramat, Dusun Andalas, dan Dusun Bina Kaya. Total penduduk Desa Pohuwato sebanyak 1.846 jiwa. Kepala Desa Pohuwato sejak 2016 sampai sekarang adalah Bapak Sahrianto Lamapa, SE dan Sekertaris Desa Pohuwato dijabat oleh Bapak Mohamad Husin, S. Pd. I.

C. Desa Pohuwato Timur

Desa Pohuwato Timur merupakan hasil pemekaran Desa Pohuwato sejak tahun 2007. Sama halnya dengan mata pencaharian penduduk Desa Pohuwato, Desa Pohuwato Timur mayoritas penduduknya bermata pencaharian nelayan. Jumlah penduduk Desa Pohuwato Timur sekarang adalah 2.408 jiwa. Kepala Desa Pohuwato Timur sekarang dijawab oleh Bapak Riska Ismail.

D. Desa Marisa Utara

Desa Marisa Utara merupakan hasil pemekaran dari Desa Marisa sejak tahun 2016 dengan luas wilayah adalah 550 Ha. Sedangkan jumlah penduduk Desa Marisa Utara sebanyak 3.930 jiwa. Desa Marisa Utara sekarang dipimpin oleh Bapak Iwan Kadir. Mata pencaharian penduduk Desa Marisa Utara adalah ASN, petani dan wiraswasta.

E. Desa Teratai

Desa Teratai terbentuk sejak tahun 2014 dengan luas wilayah adalah 698 Ha. Sementara Jumlah penduduk Desa Teratai sebanyak 2.342 jiwa. Sedangkan mata pencaharian penduduk Desa Teratai adalah petani dan umumnya petani jagung dan sisanya adalah petani tambak dan buruh bangunan. Sekarang Desa Teratai dipimpin oleh Bapak Simson Hasan, SH.

F. Desa Botubilotahu

Desa Botubilotahu terbentuk sejak tahun 2003 dengan luas wilayah adalah 586 Ha sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 2.583 jiwa. Rata-rata penduduk Desa Botubilotahu bermata pencaharian adalah wiraswasta, ASN dan petani. Desa Botubilotahu dipimpin atau dijabat oleh Bapak One Mbuinga, SE.

G. Desa Palopo

Desa Palopo merupakan hasil dari pemekaran Desa Marisa sejak tahun 2008 dengan luas wilayah adalah 700 Ha. Desa Palopo mayoritas wilayahnya sebagai pusat perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Desa Palopo memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.120 jiwa. Sedangkan mata pencaharian penduduk di desa ini adalah mayoritas PNS dan wiraswasta dan sisanya adalah petani dan nelayan. Sekarang Desa Palopo dijawab oleh Ibu Ely Djafar, S. Ip.

4.2. Identifikasi Responden

Identifikasi responden penelitian sebagai salah satu usaha untuk memberikan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan memiliki responden yang beraneka ragam. Identifikasi responden yang dimaksud di sini adalah tentang jenis kelamin, tingkat pendidikan dan tupoksi responden.

a. Jenis kelamin

Berdasarkan hasil penelitian dari tujuh Kantor desa di Kecamatan Marisa, maka dapat dilihat dari tabel identifikasi jenis kelamin berikut.

Tabel 4.9
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Laki-Laki	12	34,29
Perempuan	23	65,71
Total	35	100

Sumber : Data olahan, 2022

Pada tabel di atas terlihat, bahwa mayoritas aparat desa sebagai responden penelitian adalah perempuan yaitu 23 orang atau 65,71% dan sisanya laki-laki sebanyak 12 orang atau 34,29%.

b. Tingkat pendidikan

Tingkat seorang aparat desa sebagai salah satu tolok ukur bahwa aparat tersebut memiliki wawasan yang memadai, kemampuan, sikap nilai-nilai dan makna tentang tugas dan tanggung jawab yang diembangkannya. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan yang dimiliki ditinjau dari berbagai aspek sehingga yang dihasilkan dapat dimaksimalkan. Berikut tabel tingkat pendidikan responden.

Tabel 4.10
Tingkat Pendidikan Responden

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
SLTA	11	31,43
Sarjana (S1)	24	68,57
Total	35	100

Sumber : Data olahan, 2022

Pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas aparat desa di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato yang menjadi responden adalah memiliki tingkat pendidikan sarjana yaitu 24 orang atau 68,57%. Artinya, peluang untuk menghasilkan kinerja secara maksimal sangat besar sedangkan 11 orang atau 31,43% tamatan SLTA atau sederajat.

4.3. Deskripsi Hasil Penelitian

Untuk mendeskripsikan variabel penelitian, maka perlu standar interpretasi setiap item pertanyaan atau indikator variabel. Formulasi yang digunakan adalah :

1. Skor terendah dikalikan dengan setiap item pertanyaan kemudian dikalikan dengan total responden.
2. Skor tertinggi dikalikan dengan setiap item pertanyaan kemudian dikalikan dengan jumlah responden.
3. Mencari selisih antara hasil point pertama dengan hasil akhir point kedua, kemudian dibagi dengan lima (alternatif pilihan menurut Skala Likert).

Adapun formulasinya sebagai berikut :

$$\text{Bobot terendah X item X jumlah responden} = 1 \times 1 \times 35 = 35$$

$$\text{Bobot tertinggi X item X jumlah responden} = 5 \times 1 \times 35 = 175$$

Dari perhitungan rentang skala di atas, maka diperoleh bobot terendah sampai pada bobot tertinggi adalah :

$$\text{Rentang Skala} = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Alternatif}}$$

$$\text{Rentang Skala} = \frac{175 - 35}{5} = 28$$

Tabel 4.11
Rentang Skala Skor Item Pertanyaan

Range	Kategori
148 - 175	Sangat tinggi
120 - 147	Tinggi
92 - 119	Sedang
64 - 91	Rendah
35 - 63	Sangat rendah

Sumber : Data olahan, 2022

4.3.1. Analisis Variabel Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Deskriptif hasil tanggapan responden setiap indikator variabel APIP pada kantor desa di Kecamatan Marisa dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.12
Tanggapan Responden terhadap Variabel Pengawasan
Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah

Tanggapan Responden	Item Pertanyaan										
	1			2			3				
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%		
5	20	100	57,14	13	65	37,14	14	70	40		
4	15	60	42,86	22	88	62,86	17	68	48,57		
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	0	0	0	0	0	4	8	11,43		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jumlah	35	160	100	35	153	100	35	138	100		
Ket.	Sangat tinggi			Sangat tinggi			Tinggi				
Item Pertanyaan											
4			5			6			7		
F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
16	80	45,71	17	85	48,57	10	50	28,57	19	95	54,29
19	68	54,29	17	68	48,57	22	88	62,86	16	64	45,71
0	0	0	1	3	2,86	1	3	2,86	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	0	5,71	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	148	100	35	156	100	35	141	100	35	159	100
Sangat tinggi			Sangat tinggi			Tinggi			Sangat tinggi		

Item Pertanyaan								
8			9			10		
F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
26	130	74,29	23	115	65,71	25	125	71,43
9	36	25,71	12	48	34,29	8	32	22,86
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	4	5,71
0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	166	100	35	163	100	35	161	100
Sangat tinggi			Sangat tinggi			Sangat tinggi		

Sumber : Data olahan, 2022

Gambaran secara kuantitatif tanggapan responden terhadap variabel pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada kantor desa di Kecamatan Marisa adalah sebagai berikut.

Item pertama : Berdasarkan tanggapan responden; 20 (57,14%) orang responden yang memberikan tanggapan sangat setuju dan 15 (42,86%) orang responden yang memberikan tanggapan setuju. Total skor item pertama adalah 160 dan ini merupakan suatu tanda, bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai tim auditor selalu melakukan reviu atas kinerja instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa sesuai prosedur yang berlaku dan masuk dalam kategori sangat tinggi.

Item ke dua : menurut tanggapan responden adalah 13 (37,14%) yang menjawab sangat setuju, 22 (62,86%) yang menjawab setuju. Total skor pada item ini adalah 153 dan ini menjelaskan, bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selaku tim auditor selalu melakukan pembinaan sumber daya manusia dan masuk kategori sangat tinggi .

Item ke tiga : menurut pendapat responden adalah 14 (40%) yang menanggapi sangat setuju, 17 (48,57%) orang responden yang menjawab setuju dan 4 (11,43%) responden yang memberikan tanggapan tidak setuju. Total skor pada item ke tiga adalah sebesar 138 dan hal tersebut menjelaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai tim auditor selalu melakukan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi instansi sesuai dengan prosedur yang berlaku dan masuk kategori tinggi.

Item ke empat : mendapat respon yakni 16 (45,71%) yang menanggapi sangat setuju, 19 (54,29% menanggapi setuju Total skor sebesar 148 dengan demikian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai tim auditor senantiasa menekankan pentingnya pengendalian fisik dan aset instansi dan masuk kategori sangat tinggi.

Item ke lima : berdasarkan tanggapan responden yakni 17 (48,57%) orang responden yang menjawab sangat setuju, 17 (48,57%) orang responden yang menjawab setuju dan 1 (2,86%) responden menjawab ragu-ragu dan total skor item ke lima adalah 156, dan ini menunjukkan, bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai tim auditor selalu melakukan penetapan dan mereviu atas indikator dan ukuran kinerja sesuai prosedur yang berlaku dan masuk kategori sangat tinggi.

Item ke enam : mendapat tanggapan responden adalah; 10 (28,57%) responden memberikan tanggapan sangat setuju, 22 (62,86%) memberikan tanggapan setuju, 1,28%) responden memberikan tanggapan ragu-ragu dan 2 (5,71) responden tidak setuju. Total skor item enam adalah 141 dan merupakan suatu

gambaran bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selaku tim auditor sering menekankan pentingnya pemisahan fungsi pada instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa termasuk tinggi.

Item ke tujuh : berdasarkan tanggapan responden adalah ; 19 (54,29%) responden memberikan tanggapan sangat setuju dan 16 (45,71%) responden memberikan tanggapan setuju. Total skor item ke tujuh adalah 159, skor tersebut menggambarkan, bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai tim auditor selalu melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting instansi desa di Kecamatan Marisa dan masuk kategori sangat tinggi.

Item ke delapan : tanggapan responden adalah; 26 (74,29%) responden memberikan tanggapan sangat setuju dan 9 (25,71%) responden memberikan tanggapan setuju. Total skor item ke delapan sebesar 166 dan ini menandakan, bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selaku tim auditor selalu menekankan pentingnya pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian pada instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa dan masuk kategori sangat tinggi.

Item ke Sembilan : menurut tanggpan responden adalah; 23 (65,71%) responden memberikan tanggapan sangat setuju dan 12 (34,29%) responden memberikan tanggapan setuju. Total skor pada item ini adalah sebesar 163 dan menggambarkan, bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai tim auditor selalu mengedepankan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya tergolong dalam kategori sangat tinggi.

Item ke sepuluh : tanggapan responden adalah 25 (71,43%) responden menjawab sangat setuju, 8 (22,86%) responden menjawab setuju dan 2 (5,71%) responden yang menjawab tidak setuju. Total skor item ke sepuluh adalah 161 dan ini merupakan suatu bukti, bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai tim auditor selalu menekankan pentingnya dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting pada instansi pemerintah tergolong kategori sangat tinggi.

4.3.2. Analisis Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan

Deskripsi hasil penelitian tanggapan responden setiap item atau indikator variabel kualitas pelaporan keuangan pada instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa dapat dilihat pada tabel 4.9

Tabel. 4.13
Tanggapan Responden terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Tanggapan Responden	Item Pertanyaan								
	1			2			3		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	15	75	42,86	17	85	48,57	16	80	45,71
4	19	76	54,28	18	72	51,43	18	72	51,43
3	0	0	0	0	0	0	1	3	2,86
2	1	2	2,86	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	35	151	100	35	157	100	35	155	100
Ket.	Sangat tinggi			Sangat tinggi			Sangat tinggi		

4			5			6			7		
F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
21	105	60	21	105	60	11	55	31,43	11	55	31,43
14	56	40	13	52	37,14	22	88	62,85	21	84	60
0	0	0	1	3	2,86	1	3	2,86	3	9	8,57
0	0	0	0	0	0	1	2	2,86	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	161	100	35	160	100	35	148	100	35	148	100
Sangat tinggi			Sangat tinggi			Sangat tinggi			Sangat tinggi		

8			9			10			11		
F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
13	65	37,14	21	105	60	21	105	60	8	40	22,86
18	72	51,43	12	48	34,29	13	52	37,14	18	72	51,43
3	9	8,57	2	6	5,71	0	0	0	8	24	22,86
1	2	2,86	0	0	0	1	2	2,86	1	2	2,85
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	148	100	35	159	100	35	159	100	35	138	100
Sangat tinggi			Sangat tinggi			Sangat tinggi			Tinggi		

12			13			14			15		
F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
14	70	40	11	55	31,43	10	50	28,57	10	50	28,57
19	76	54,28	20	80	57,14	24	96	68,57	25	100	71,43
1	3	2,86	3	9	8,57	1	3	2,86	0	0	0
1	2	2,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	2,86	0	0	0	0	0	0
35	151	100	35	145	100	35	149	100	35	150	100
Sangat tinggi			Tinggi			Sangat tinggi			Sangat tinggi		
16			17			18					
F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%			
10	50	28,57	14	70	40	11	55	31,43			
22	88	62,86	20	80	57,14	21	84	60			
3	9	8,57	1	3	2,86	3	9	8,57			
0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0			
35	157	100	35	153	100	35	148	100			
Sangat tinggi			Sangat tinggi			Sangat tinggi					

Sumber : Data Olahan, 2022

Uraikan analisis tanggapan responden terhadap variabel kualitas pelaporan keuangan sebagai berikut.

Item pertama : mendapat tanggapan dari 35 orang responden adalah 15 (42,86%) orang responden memberikan tanggapan sangat setuju, 19 (54,28%) orang responden memberikan tanggapan setuju dan 1 (2,86%) orang responden memberikan tanggapan tidak setuju. Total skor item pertama sebesar 151. Artinya dalam hal ini tim auditor selalu dapat mempengaruhi keputusan pelaporan keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa dan tergolong sangat tinggi.

Item ke dua : mendapat tanggapan responden adalah 17 (48,57%) orang responden memberikan tanggapan sangat setuju dan 18 (51,43%) orang responden menjawab setuju. Skor item ke dua sebesar 157, artinya tim auditor selalu memiliki umpan balik terhadap pelaporan keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa dan masuk dalam kategori sangat tinggi.

Item ke tiga : mendapat tanggapan responden yaitu; 16 (45,71%) orang responden sangat setuju, 18 (51,43%) orang responden memberikan tanggapan setuju dan 1 (2,86%) orang responden menjawab ragu-ragu. Total skor item ke tiga adalah 155 dan ini menjelaskan, bahwa pelaporan keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa selalu memiliki manfaat prediktif hal ini masuk dalam kategori sangat tinggi.

Item ke empat : mendapatkan tanggapan responden adalah 21 (60%) orang responden memberikan tanggapan sangat setuju dan 14 (40%) orang responden memberikan tanggapan setuju. Total skor pada item ke lima adalah 161 dan hal ini

melambangkan, bahwa pelaporan keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa harus selalu tepat waktu dan kategorinya kategori sangat tinggi.

Item ke lima : menurut tanggapan responden yaitu : 21 (60%) orang responden yang menjawab sangat setuju dan 14 (40%) orang responden yang menjawab setuju. Total skor pada item ini adalah 160, dengan demikian pelaporan keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa mutlak selalu lengkap dan masuk dalam kategori sangat tinggi.

Item ke enam : menurut tanggapan responden adalah 11 (31,43%) orang responden yang menjawab sangat setuju, 22 (62,85)% orang responden yang menjawab setuju, 1 (2,86%) orang responden yang menjawab ragu-ragu dan 1 (2,86%) orang responden yang menjawab tidak setuju. Total skor pada item ke enam adalah sebesar 148 dan hal tersebut menggambarkan, bahwa pelaporan keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa selalu bebas dari kekeliruan tergolong dalam kategori sangat tinggi.

Item ke tujuh : Adapun tanggapan responden yakni : 11 (31,43%) orang responden yang menjawab sangat setuju, 21 (60%) orang responden yang menjawab setuju dan 3 (8,57%) orang responden yang menjawab ragu-ragu. Total skor pada item ke tujuh adalah 148, artinya pelaporan keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa selalu bebas dari kesalahan material dan masuk kategori sangat tinggi.

Item ke delapan : tanggapan responden yakni 13 (37,14%) orang responden yang menjawab sangat setuju, 18 (51,43%) orang responden yang menjawab setuju, 3 (8,57%) orang responden yang menjawab ragu-ragu dan 1 (2,86%) orang

responden yang menjawab tidak setuju. Total skor pada item ke delapan adalah 148, artinya pelaporan keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa selalu bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kategori sangat tinggi.

Item ke sembilan : tanggapan responden yakni : 21 (60%) orang responden yang menjawab sangat setuju, 12 (34,27%) orang responden yang menjawab setuju dan 2 (5,71%) orang responden yang menjawab ragu-ragu. Total skor pada item ke sembilan adalah 159, artinya pelaporan keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa selalu memiliki sifat jujur dan tergolong dalam kategori sangat tinggi.

Item ke sepuluh : tanggapan responden yakni : 21 (60%) orang responden yang menjawab sangat setuju, 13 (37,14%) orang responden yang menjawab setuju dan 1 (86%) orang responden yang menjawab tidak setuju. Total skor pada item ke sepuluh adalah 159, artinya pelaporan keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa selalu dapat diverifikasi dan masuk kategori sangat tinggi.

Item ke sebelas : tanggapan responden yakni : 8 (22,86%) orang responden yang menjawab sangat setuju, 18 (51,43%) orang responden yang menjawab setuju, 8 (22,86%) orang responden yang menjawab ragu-ragu dan 1 (2,86%) orang responden yang menjawab tidak setuju. Total skor pada item ke sebelas adalah 138, artinya pelaporan keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa senantiasa menguntungkan bagi pengguna dan tergolong dalam kategori tinggi.

Item ke dua belas : tanggapan responden yakni : 14 (40%) orang responden yang menjawab sangat setuju, 19 (54,28%) orang responden yang menjawab

setuju, 1 (2,86%) orang responden yang menjawab ragu-ragu dan 1 (2,86%) orang responden yang menjawab tidak setuju. Total skor pada item ke dua belas adalah 151, artinya pelaporan keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa selalu sesuai kebutuhan serta masuk dalam kategori sangat tinggi.

Item ke tiga belas : tanggapan responden yakni : 11 (31,43%) orang responden yang menjawab sangat setuju, 19 (54,28%) orang responden yang menjawab setuju, 1 (2,86%) orang responden yang menjawab ragu-ragu dan 1 (2,86%) orang responden yang menjawab tidak setuju. Total skor pada item ke tiga belas adalah 145, artinya pelaporan keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa senantiasa dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya tergolong tinggi.

Item ke empat belas : tanggapan responden yakni : 11 (28,57%) orang responden yang menjawab sangat setuju, 24 (68,57%) orang responden yang menjawab setuju dan 1 (2,86%) orang responden yang menjawab ragu-ragu. Total skor pada item ke empat belas adalah 149, artinya pelaporan keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa selalu dapat dibandingkan secara internal dan masuk dalam kategori sangat tinggi.

Item ke lima belas : tanggapan responden yakni 10 (28,57%) orang responden yang menjawab sangat setuju, 25 (71,43%) orang responden yang menjawab setuju. Total skor pada item ke lima belas adalah 150, artinya pelaporan keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa selalu dapat dibandingkan secara eksternal dan tergolong sangat tinggi.

Item ke enam belas : tanggapan responden yakni : 10 (28,57%) orang responden yang menjawab sangat setuju, 22 (62,86%) orang responden yang menjawab setuju dan 3 (8,57%) orang responden yang menjawab ragu-ragu. Total skor pada item ke enam belas adalah 157, artinya pelaporan keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa selalu berguna bagi pemakai atau pihak yang berkepentingan dan masuk dalam kategori sangat tinggi.

Item ke tujuh belas : tanggapan responden yakni : 14 (40%) orang responden yang menjawab sangat setuju, 20 (57,14%) orang responden yang menjawab setuju dan 1 (2,86%) orang responden yang menjawab ragu-ragu. Total skor pada item ke tujuh belas adalah 153, artinya pelaporan keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa selalu mudah dipahami oleh pengguna serta masuk kategori sangat tinggi.

Item ke delapan belas : tanggapan responden yakni : 11 (31,43%) orang responden yang menjawab sangat setuju, 21 (60%) orang responden yang menjawab setuju dan 3 (8,57%) orang responden yang menjawab ragu-ragu. Total skor pada item ke delapan belas adalah 148, artinya pengguna selalu memiliki kemauan untuk mempelajari informasi keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa dan tergolong ke dalam kategori sangat tinggi.

4.4. Hasil Analisis Data

4.4.1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan metode mencari korelasi antara item pertanyaan atau pertanyaan dengan total skor. Variabel Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) dan kualitas pelaporan keuangan. Total pernyataan atau pertanyaan yang disebarkan kepada responden adalah pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (x) sebanyak 10 item pernyataan dan kualitas pelaporan keuangan (Y) sebanyak 18 item pernyataan jadi total item pernyataan sebanyak 28. Berikut hasil uji validitas variabel pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah sebagai berikut.

Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (X)

Item	r hitung	r tabel	Sig	Ket
X11	0,639	0.334	0,000	Valid
X12	0,624	0.334	0,000	Valid
X13	0,396	0.334	0,018	Valid
X14	0,722	0.334	0,000	Valid
X15	0,771	0.334	0,000	Valid
X16	0,844	0.334	0,000	Valid
X17	0,735	0.334	0,000	Valid
X18	0,770	0.334	0,000	Valid
X19	0,570	0.334	0,000	Valid
X110	0,669	0.334	0,000	Valid

Sumber : Data olahan, 2022

Berdasarkan hasil uji validitas untuk item pernyataan variabel Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (X), semua item pernyataan dalam daftar kuisioner dinyatakan valid karena nilai r menunjukkan positif atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebagaimana yang tampak pada tabel di atas yaitu t_{tabel} sebesar 0,334.

Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan (Y)

Item	r hitung	r tabel	Sig	Ket
Y11	0,580	0.334	0,000	Valid
Y12	0,516	0.334	0,002	Valid
Y13	0,564	0.334	0,000	Valid
Y14	0,564	0.334	0,000	Valid
Y15	0,649	0.334	0,000	Valid
Y16	0,571	0.334	0,000	Valid
Y17	0,777	0.334	0,000	Valid
Y18	0,693	0.334	0,000	Valid
Y19	0,738	0.334	0,000	Valid
Y110	0,717	0.334	0,000	Valid
Y111	0,575	0.334	0,000	Valid
Y112	0,571	0.334	0,000	Valid
Y113	0,707	0.334	0,018	Valid
Y114	0,772	0.334	0,000	Valid
Y115	0,764	0.334	0,000	Valid
Y116	0,771	0.334	0,000	Valid
Y117	0,735	0.334	0,000	Valid
Y118	0,581	0.334	0,000	Valid

Sumber : Data olahan, 2022

Berdasarkan hasil uji validitas untuk item pernyataan variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y), semua item dinyatakan valid. Hal ini dapat dibuktikan

dengan melihat tabel di atas dimana semua nilai r adalah positif, artinya t. hitung > t. tabel.

4.4.2. Hasil Uji Reliabilitas

a. Variabel Pengawasan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (X)

Tabel 4.14
Hasil Uji Reliabilitas Variabel
Pengawasan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (X)

Item	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Ket
X11	0.825	Reliabel
X12	0.826	Reliabel
X13	0.881	Reliabel
X14	0.817	Reliabel
X15	0.811	Reliabel
X16	0.798	Reliabel
X17	0.816	Reliabel
X18	0.815	Reliabel
X19	0.831	Reliabel
X110	0.828	Reliabel

Sumber : Data olahan, 2022

Nilai koefisien alpha untuk variabel pengawasan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (X) lebih besar dari 0,6 maka dapat dijelaskan, bahwa instrumen penelitian tersebut adalah handal dan reliabel.

b. Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan (Y)

Tabel 4.15
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan (Y)

Item	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Ket
Y11	0.924	Reliabel
Y12	0.925	Reliabel
Y13	0.924	Reliabel
Y14	0.924	Reliabel
Y15	0.926	Reliabel
Y16	0.925	Reliabel
Y17	0.920	Reliabel
Y18	0.922	Reliabel
Y19	0.923	Reliabel
Y110	0.926	Reliabel
Y111	0.930	Reliabel
Y112	0.929	Reliabel
Y113	0.926	Reliabel
Y114	0.922	Reliabel
Y115	0.923	Reliabel
Y116	0.921	Reliabel
Y117	0.922	Reliabel
Y118	0.927	Reliabel

Sumber : Hasil olah data 2022

Nilai koefisien alpha untuk variabel kualitas pelaporan keuangan (Y) lebih besar dari 0,6 maka dapat dijelaskan, bahwa instrumen penelitian tersebut handal dan reliabel.

4.4.3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Tabel 4.16
Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

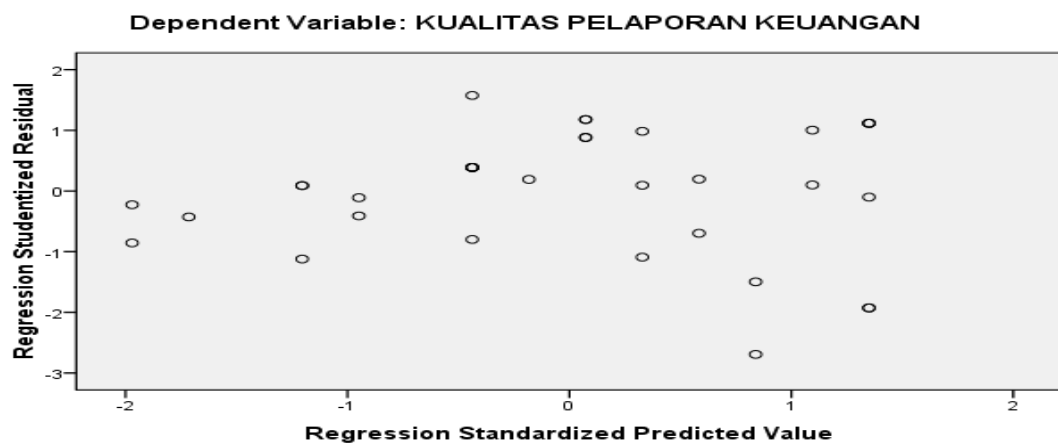
		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.10552174
Most Extreme Differences	Absolute	.174
	Positive	.174
	Negative	-.076
Kolmogorov-Smirnov Z		1.031
Asymp. Sig. (2-tailed)		.238
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Data olahan, 2022

Probabilitas yang diperoleh dengan taraf signifikansi 0,238. Nilai ini lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 maka dengan demikian data masuk kategori terdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedasitas

Scatterplot



Sumber : Data olahan, 2022

c. Analisis Regresi Linier Sederhana

Dalam memecahkan permasalahan serta membuktikan hipotesis penelitian, digunakan metode analisis regresi linier sederhana. Metode analisis regresi sederhana merupakan metode analisis untuk menjelaskan besarnya pengaruh variabel Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap variabel kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah desa di Kecamatan Marisa.

Hasil penelitian yang dianalisis melalui program SPSS sebagaimana yang tercantum pada tabel koefisien sebagai berikut.

Tabel 4.17
Coefisien

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.270	.627		2.026	.051
	Pengawasan APIP	.685	.140	.649	4.904	.000

a. Dependent Variabel: Kualitas Pelaporan Keuangan

Sumber : Data olahan, 2022

Berdasarkan hasil olahan data sebagaimana tertera pada tabel *coefficiens* di atas, maka diperoleh persamaan regresi linear sederhana : $Y = 1,270 + 0,685 + \epsilon$. Berangkat dari persamaan regresi linier sederhana tersebut, maka dapat dideskriptifkan, bahwa nilai konstanta atau nilai tetap sebesar 1,270 mencerminkan capaian kualitas pelaporan keuangan pada instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa tanpa dipengaruhi oleh variabel independen salah satu diantaranya yang diteliti adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Artinya, jika Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diasumsikan sama dengan nol, maka

capaian kualitas pelaporan keuangan pada instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa sebesar 1,270 point.

Koefisien variabel Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (b) sebesar = 0,685, menggambarkan besarnya pengaruh variabel Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal tersebut juga mencerminkan, bahwa apa bila Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ditingkatkan sebesar satu satuan, maka kualitas pelaporan keuangan ikut meningkat sebesar 0,685 point atau 68,50%.

Sedangkan ekselon (€) merupakan simbol variabel yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang tidak diteliti, misalnya; kemampuan aparat desa, sarana prasarana, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, tingkat pendidikan pengelola keuangan, pengalaman kerja dan lain sebagainya.

Sementara kontribusi variabel Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap variabel kualitas pelaporan keuangan pada instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa dapat dilihat pada tabel *model summary* yaitu koefisien determinasi (r^2). Hasil analisis data sebagaimana tertera pada tabel olahan data berikut.

Tabel 4.18
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.649 ^a	.422	.404	.319
a. Predictors: (Constant), Pengawasan APIP				

Sumber : Data olahan, 2022

Pada tabel di atas, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,422. Angka 0,422 ini menggambarkan bahwa besarnya kontribusi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap kualitas pelaporan keuangan pada instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa adalah sebesar 42,20%. Koefisien determinansi atau determinan ini juga menggambarkan besarnya partisipasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di antara variabel lainnya yang berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa yaitu sebesar 42,20%. Sedangkan sisanya sebesar 57,80% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti (C) misalnya kemampuan aparat desa, sarana prasarana, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, tingkat pendidikan pengelola keuangan, pengalaman kerja dan lain sebagainya.

4.4.4. Analisis Korelasi dan Uji Signifikan

Untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi (r) antar variabel penelitian digunakan analisis korelasi, dalam hal ini korelasi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan kualitas pelaporan keuangan pada instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa.

Dalam analisis korelasi hasil penelitian, maka diperoleh angka sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut.

Tabel 4.19
Correlations

		Pengawasan APIP	Kualitas Pelaporan Keuangan
APIP	Pearson Correlation	1	.649**
	Sig. (1-tailed)		.000
	N	35	35
Kualitas Pelaporan Keuangan	Pearson Correlation	.649**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	
	N	35	35
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).			

Sumber : Data olahan, 2022

Dalam tabel di atas didapatkan nilai korelasi (r) = 0,649 antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan kualitas pelaporan keuangan dimana Nilai korelasi (r) sebesar 0,649 mendeskripsikan, bahwa korelasi atau hubungan antara pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan kualitas pelaporan keuangan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa sebesar 64,90% merupakan suatu hubungan yang kuat atau erat.

Untuk uji signifikansi atau uji kelayakan hubungan antar variabel penelitian digunakan uji t. Penelitian yang dilakukan instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa dengan taraf kesalahan atau taraf signifikan (α) = 0,05 dan tingkat kebebasan (df) $n - 2$ yaitu : $35 - 2 = 33$.

Hasil analisis data seperti tertera pada tabel 7 Koefisien Hasil Olahan Data Program SPSS diperoleh nilai sig. sebesar 0,000. Uji signifikansi menggunakan taraf kesalahan sebesar 0,05 atau 5%. Artinya, taraf kesalahan $0,05 > \text{sig.}$ sebesar 0,000, dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hubungan atau korelasi (r) sebesar 64,90% antara pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan kualitas pelaporan keuangan pada instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa adalah signifikan.

4.5. Pembahasan

Hipotesis penelitian “Penerapan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah desa (Studi penelitian Kantor Desa Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato)” terbukti setelah dilakukan analisis data sebagaimana pada uraian selanjutnya.

Variabel pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mengacu pada juknis Pusdiklatwas BPKP (2009 : 12), yang menjelaskan, bahwa unsur kegiatan pengendalian yang dapat diterapkan pada berbagai tingkat organisasi atau semua instansi pemerintah salah satu di antaranya adalah pemerintah desa meliputi: (1) Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, (2) Pembinaan sumber daya manusia, (3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, (4) Pengendalian fisik dan aset, (5) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja, (6) Pemisahan fungsi, (7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, (8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu

atas transaksi dan kejadian, (9) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya dan (10) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

Penerapan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato yang terdiri dari sepuluh (10) indikator di atas terlihat jelas pengaruhnya terhadap kualitas pelaporan keuangan desa.

Indikator kualitas pelaporan keuangan instansi pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (2011 : 10-12) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Oleh karena itu diperlukan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Hasil olahan data diperoleh nilai koefisien variabel (b) sebesar 0,685 atau 68,50%. Artinya, pengaruh pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari sepuluh (10) indikator terhadap kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Desa Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato bersifat positif sebesar 68,50% dan signifikan.

Sedangkan hubungan antara pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan kualitas pelaporan keuangan pada Kantor Desa Sekecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato masuk dalam kategori hubungan yang erat yaitu sebesar 64,90%. Melalui hasil olahan data primer penelitian, maka dapat

disimpulkan, bahwa kualitas pelaporan keuangan desa khususnya Kantor Desa yang ada di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sangat tergantung dari pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Variabel independen (pengawasan APIP) yang dimuat dalam juknis Pusdiklatwas BPKP (2009 : 12) terdiri dari sepuluh (10) diharapkan dapat berdampak positif terhadap kualitas pelaporan keuangan instansi pemerintah termasuk (pemerintah desa) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (2011 : 10-12) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Berangkat dari hasil analisis data penelitian, maka dapat dijelaskan, bahwa pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan instansi pemerintah dalam hal ini pemerintah desa Sekecamatan Marisa yang terdiri dari tujuh (7) desa.

Deskripsi dari ke empat penelitian terdahulu yang dijadikan pembandingan adalah :

1. Risikiyanto Tantu “STIE Ihcsan Pohuwato dengan judul penelitian Analisis persepsi auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pohuwato. Hasil analisis data adalah berdasarkan analisis data sebagaimana tertera pada tabel di atas, rata-rata setiap item indikator kualitas laporan keuangan yang dihasilkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato sebesar 68,17 dan masuk dalam kategori besar.

Hal tersebut mendeskriptifkan, bahwa kualitas laporan keuangan pada Rumah Sakit Umum Saerah Kabupaten Pohuwato menurut persepsi auditor internal masuk dalam kategori baik (efketif).

2. Pengaruh kepemimpinan, kapasitas fungsi akuntansi, peran APIP terhadap kualitas pelaporan keuangan. Model penelitian dan hipotesis telah diuji dengan model persamaan struktural kuadrat terkecil parsial (SEM PLS) dan dianalisis dengan menggunakan sofware smart PLS 3.2.9 dengan 226 sampel yang diperoleh dari satuan kerja dari BPS di seluruh Indonesia dengan responden yakni pegawai yang bidangannya menjalankan fungsi akuntansi atau yang menyusun pelaporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan dan peran APIP berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas, kepemimpinan, kapasitas fungsi akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas, kepemimpinan, kapasitas fungsi akuntansi. Peran APIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan serta kualitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.
Sumber : (Lusy Oktaviana, Surya Raharja, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2021. Jurnal APIP terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. UNDIP Bandung.
3. Pengaruh Prosedur, Pendidikan, Tekanan dan Anggaran Reviu pada Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Penelitian APIP Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota di Bali). Metode Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur reviu, latar belakang pendidikan dan anggaran dana reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD, tekanan waktu penugasan dan kompleksitas tugas yang tinggi maka

inspektorat daerah diharapkan agar mengoptimalkan pengaturan penugasan antara anggaran waktu dan kompleksitas tugas agar risiko penurunan kualitas review rendah. Sumber : Komang Widyarini, dkk, 2016 Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana 455-488, 2016 Penerbit Universitas Udayana Bali.

4. Pengaruh Kode Etik APIP terhadap kinerja auditor pemerintah pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Hasil pengujian hipotesis pertama menjelaskan integritas tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah. Pengujian hipotesis kedua, bahwa objektivitas berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah. Pengujian ketiga, bahwa kerahasiaan tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah. Pengujian keempat. Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah. Secara simultan integritas, kerahasiaan dan kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara.

Sumber : Engelita O Kneefel, dkk, 2017 Pengaruh Kode Etik APIP terhadap kinerja auditor pemerintah pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara, Penerbit Going Concern, Jurnal Riset Akuntansi 12 (2), 2017, Unsrat Manado.

Melihat deskripsi kesimpulan dari ke empat penelitian terdahulu, maka dapat diuraikan adalah; (1) Analisis persepsi auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pohuwato. Hasil analisis data adalah berdasarkan analisis data sebagaimana tertera pada tabel di atas, rata-rata setiap item indikator kualitas laporan keuangan yang dihasilkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato sebesar 68,17 dan masuk dalam

kategori besar. Hal tersebut mendeskriptifkan, bahwa kualitas laporan keuangan pada Rumah Sakit Umum Saerah Kabupaten Pohuwato menurut persepsi auditor internal masuk dalam kategori baik (efketif). (2) Pengaruh kepemimpinan, kapasitas fungsi akuntansi, peran APIP terhadap kualitas pelaporan keuangan. Model penelitian dan hipotesis telah diuji dengan model persamaan struktural kuadrat terkecil parsial (SEM PLS) dan dianalisis dengan menggunakan sofware smart PLS 3.2.9 dengan 226 sampel yang diperoleh dari satuan kerja dari BPS di seluruh Indonesia dengan responden yakni pegawai yang bidangnya menjalankan fungsi akuntansi atau yang menyusun pelaporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan dan peran APIP berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas, kepemimpinan, kapasitas fungsi akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas, kepemimpinan, kapasitas fungsi akuntansi. Peran APIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan serta kualitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Dan (3) Pengaruh Prosedur, Pendidikan, Tekanan dan Anggaran Reviu pada Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Penelitian APIP Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota di Bali). Metode Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur reviu, latar belakang pendidikan dan anggaran dana reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD, tekanan waktu penugasan dan kompleksitas tugas yang tinggi maka inspektorat daerah diharapkan agar mengoptimalkan pengaturan penugasan antara anggaran waktu dan kompleksitas tugas agar risiko penurunan kualitas reviu rendah.

Ketiga hasil penelitian terdahulu se arah dengan hasil penelitian yaitu pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sedangkan penelitian terdahulu dengan judul Pengaruh Kode Etik APIP terhadap kinerja auditor pemerintah pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Hasil pengujian hipotesis pertama menjelaskan integritas tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah. Pengujian hipotesis kedua, bahwa objektivitas berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah. Pengujian ketiga, bahwa kerahasiaan tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah, pengujian keempat. Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah. Secara simultan integritas, kerahasiaan dan kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara tidak se arah dengan hasil penelitian yaitu pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah desa sekecamatan Msrisa Kabupaten Pohnpei.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Bertitik tolak dari hasil analisis data kuantitatif, maka penelitian yang dilakukan pada instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa dapat disimpulkan adalah :

1. Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dengan rata-rata skor sebesar 154,5 dan masuk dalam kategori sangat tinggi
2. Kualitas pelaporan keuangan pada Instransi pemerintah desa di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dengan rata-rata skor sama dengan 152,06 dan tergolong ke dalam kategori sangat tinggi.
3. Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berpengaruh positif sebesar 68,50% dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pada instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

5.2. Saran-Saran

Berangkat dari hasil analisis data yang telah diuraikan dan kesimpulan sebelumnya, maka disarankan :

1. Tim auditor sebagai pelaksana pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Pohuwato mempertahankan hasil yang dicapai.
2. Instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato mempertahankan kualitas pelaporan keuangan yang dicapai.

3. Instansi pemerintah desa di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato tetap mempertahankan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai tim auditor yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Al. Haryono Yusup, 2005, *Dasar-dasar Akuntansi*, Penerbit STIE YKPN Yogyakarta.
- Amirullah, dkk, 2004. *Pengantar Manajemen*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Anonim, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2011. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
-, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Penerbit Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta
-Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang *perangkat daerah*, Penerbit Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Arikunto, 2001. *Metodologi Penelitian*, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit PT. Indeks Kelompok Gramedia
- Engelita O Kneefel, dkk, 2017. *Pengaruh Kode Etik APIP terhadap kinerja auditor pemerintah pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara*, Penerbit Going Concern, Jurnal Riset Akuntansi 12 (2), 2017, Unsrat Manado.
- Ihyaul Ulum MD, 2005, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang
- Kamaludin, 2011. *Manajemen Keuangan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Kasmir, 2008. *Analisis Laporan Keuangan*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang

- Komang Widyarini, dkk, 2016. *Pengaruh Prosedur, Pendidikan, Tekanan dan Anggaran Reviu pada Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Penelitian APIP Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota di Bali)*, Penerbit Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana 455-488, 2016 Penerbit Universitas Udayana Bali.
- Lusy Oktaviana, Surya Raharja, 2021. *Pengaruh kepemimpinan, kapasitas fungsi akuntansi, peran APIP terhadap kualitas pelaporan keuangan*. Penerbit Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UNDIP Bandung.
- L. M Samryn, 2002, *Akuntansi Manajerial*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Mas'ud, 2009. *Akuntansi Keuangan Menengah, Buku 2*. Penerbit BPFE Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Munawir, 2004 *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Keempat, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Pusdiklatwas BPKP, 2009. *Kegiatan Pengendalian*, Penerbit BPK Provinsi Gorontalo.
-, 2009. *Pemantauan Pengendalian Intern*, Penerbit BPK Provinsi Gorontalo.
- Riduwan, 2004. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Tesis*, Penerbit Alfabeta Bandung.
- Risikiyanto Tantu, 2018. *Analisis persepsi auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pohuwato*. Penerbit STIE Ichsan Gorontalo
- Sugiyono, 2019. *Statistika untuk Penelitian*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Umar Husain, 2002. *Metode Riset Bisnis*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Zaki Baridwan, 2000. *Intermediate Accounting*, Penerbit BPFE Yogyakarta
- Widayat, dkk, 2002. *Riset Bisnis*, Penerbit Graha Ilmu, Malang.

[illegible]

Lampiran 2. Kuisisioner Penelitian

KUISISIONER PENELITIAN

Identitas Responden

Nama :
Umur :
Pendidikan :
Pekerjaan/Tupoksi :
Lama mengabdikan :

Petunjuk Pernyataan

- 1) Pilih jawaban dari pernyataan di bawah ini dengan cara menyilang (X)
) subyektif mungkin sesuai dengan keadaan sebenarnya.

- 2) Jawaban terdiri dari :

SS	= Sangat Setuju	Bobot : 5
S	= Setuju	Bobot : 4
RR	= Ragu-ragu	Bobot : 3
TS	= Tidak Setuju	Bobot : 2
STS	= Sangat Tidak Setuju	Bobot : 1

Pernyataan :

2. Variabel Pengawasan APIP (X)

NO	PERNYATAAN	PERSEPSI				
		SS	S	RR	TS	STS
1.	Tim auditor selalu melakukan revidi atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai prosedur yang berlaku.					
2	Tim auditor selalu melakukan pembinaan sumber daya manusia.					
3	Tim auditor selalu melakukan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi instansi sesuai dengan prosedur yang berlaku.					

4	Tim auditor selalu menekankan pentingnya pengendalian fisik dan aset instansi.					
5	Tim auditor selalu melakukan penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja sesuai prosedur yang berlaku.					
6	Tim auditor menekankan pentingnya pemisahan fungsi.					
7	Tim auditor selalu melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting instansi.					
8	Tim auditor menekankan pentingnya pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.					
9	Tim auditor mengedepankan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.					
10	Tim auditor selalu menekankan pentingnya dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.					

2. Kualitas pelaporan keuangan pemerintah desa (Y)

A. Dimensi Relevansi

No	PERNYATAAN	PERSEPSI				
		SS	S	R	TS	TS
1.	Tim auditor dapat mempengaruhi keputusan pelaporan keuangan instansi.					
2.	Tim auditor memiliki umpan balik pelaporan keuangan instansi.					
3	Pelaporan keuangan instansi memiliki manfaat prediktif					

4	Pelaporan keuangan instansi harus tepat waktu					
5	Pelaporan keuangan instansi mutlak lengkap					
6	Pelaporan keuangan instansi bebas dari kekeliruan					

B. Dimensi Andal

NO	PERNYATAAN	PERSEPSI				
		SS	S	RR	TS	STS
1.	Pelaporan keuangan instansi bebas dari kesalahan material					
2.	Pelaporan keuangan instansi bebas dari pengertian yang menyesatkan					
3.	Pelaporan keuangan instansi memiliki sifat jujur					
4.	Pelaporan keuangan instansi dapat diverifikasi					
5.	Pelaporan keuangan instansi menguntungkan bagi pengguna					
6	Pelaporan keuangan instansi Sesuai kebutuhan					

C. Dimensi Dapat dibandingkan

NO	PERNYATAAN	PERSEPSI				
		SS	S	RR	TS	STS
1.	Pelaporan keuangan instansi dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya					
2	Pelaporan keuangan instansi dapat dibandingkan secara internal					
3	Pelaporan keuangan instansi dapat dibandingkan secara eksternal					
4	Pelaporan keuangan instansi berguna bagi pemakai atau pihak yang berkepentingan					

D. Dimensi Dapat Dipahami

No	PERNYATAAN	PERSEPSI				
		SS	S	RR	TS	STS
1.	Pelaporan keuangan instansi mudah dipahami oleh pengguna					
2.	Pengguna memiliki kemauan untuk mempelajari informasi keuangan keuangan instansi					

== = Atas Parttisipasi Dan Kerja Samanya Diucapkan Terima Kasih == =

Lampiran 3. Tabulasi T. Responden terhadap Variabel Pengawasan APIP

No.	Item Pertanyaan										Total	Rata-Rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5,00
2	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	43	4,30
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5,00
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5,00
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
6	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	37	3,70
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
8	4	4	4	4	4	3	4	4	4	2	37	3,70
9	5	5	4	4	4	2	4	4	4	2	38	3,80
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5,00
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5,00
13	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	46	4,60
14	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	46	4,60
15	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	46	4,60
16	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	47	4,70
17	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	43	4,30
18	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41	4,10
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5,00
20	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49	4,90
21	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	43	4,30
22	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	43	4,30
23	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	43	4,30
24	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	43	4,30
25	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	43	4,30
26	5	4	2	5	5	4	5	5	5	5	45	4,50
27	5	4	2	5	5	4	5	5	5	5	45	4,50
28	5	4	2	5	5	4	5	5	5	5	45	4,50
29	5	4	2	5	5	4	5	5	5	5	45	4,50
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41	4,10
31	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49	4,90
32	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48	4,80
33	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	47	4,70
34	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	44	4,40
35	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	48	4,80
Total	160	153	146	156	156	145	159	166	163	161	1565	156,50

Lampiran 4. Tabulasi T. Responden terhadap Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan (Y)

No.	Item Pertanyaan																		Total	Rata-Rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90	5,00
2	4	5	4	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	82	4,56
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90	5,00
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90	5,00
5	2	5	5	5	5	2	4	2	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	66	3,67
6	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	64	3,56
7	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	73	4,06
8	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	67	3,72
9	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	67	3,72
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	4,00
11	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	74	4,11
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	4,00
13	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	84	4,67
14	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	77	4,28
15	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	81	4,50
16	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	81	4,50
17	5	5	4	5	4	5	4	5	5	2	4	5	1	4	4	4	5	5	76	4,22
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	4,00
19	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	83	4,61
20	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	87	4,83
21	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	76	4,22
22	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	76	4,22
23	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	76	4,22
24	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	76	4,22
25	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	76	4,22
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	87	4,83
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	5	4	86	4,78
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	87	4,83
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	5	4	86	4,78
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	71	3,94
31	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	83	4,61
32	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	76	4,22
33	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	3	79	4,39
34	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	3	80	4,44
35	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	66	3,67
Total	153	157	155	161	160	148	148	148	159	159	138	151	145	149	150	147	153	148	2729	151,61

Lampiran 5. Hasil Olahan Data

Uji Validitas *Variabel Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (X)*

Item	r hitung	r tabel	Sig	Ket
X11	0,639	0.334	0,000	Valid
X12	0,624	0.334	0,000	Valid
X13	0,396	0.334	0,018	Valid
X14	0,722	0.334	0,000	Valid
X15	0,771	0.334	0,000	Valid
X16	0,844	0.334	0,000	Valid
X17	0,735	0.334	0,000	Valid
X18	0,770	0.334	0,000	Valid
X19	0,570	0.334	0,000	Valid
X110	0,669	0.334	0,000	Valid

Uji Validitas Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan (Y)

Item	r hitung	r tabel	Sig	Ket
Y11	0,580	0.334	0,000	Valid
Y12	0,516	0.334	0,002	Valid
Y13	0,564	0.334	0,000	Valid
Y14	0,564	0.334	0,000	Valid
Y15	0,649	0.334	0,000	Valid
Y16	0,571	0.334	0,000	Valid
Y17	0,777	0.334	0,000	Valid
Y18	0,693	0.334	0,000	Valid
Y19	0,738	0.334	0,000	Valid
Y110	0,717	0.334	0,000	Valid
Y111	0,575	0.334	0,000	Valid
Y112	0,571	0.334	0,000	Valid
Y113	0,707	0.334	0,018	Valid
Y114	0,772	0.334	0,000	Valid
Y115	0,764	0.334	0,000	Valid
Y116	0,771	0.334	0,000	Valid
Y117	0,735	0.334	0,000	Valid
Y118	0,581	0.334	0,000	Valid

Uji Reliabilitas Variabel
Pengawasan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (X)

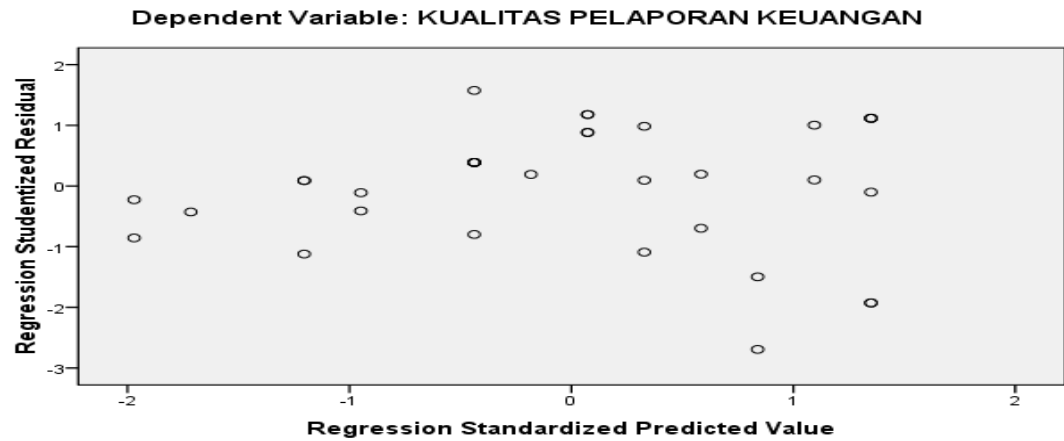
Item	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Ket
X11	0.825	Reliabel
X12	0.826	Reliabel
X13	0.881	Reliabel
X14	0.817	Reliabel
X15	0.811	Reliabel
X16	0.798	Reliabel
X17	0.816	Reliabel
X18	0.815	Reliabel
X19	0.831	Reliabel
X110	0.828	Reliabel

Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan (Y)

Item	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Ket
Y11	0.924	Reliabel
Y12	0.925	Reliabel
Y13	0.924	Reliabel
Y14	0.924	Reliabel
Y15	0.926	Reliabel
Y16	0.925	Reliabel
Y17	0.920	Reliabel
Y18	0.922	Reliabel
Y19	0.923	Reliabel
Y110	0.926	Reliabel
Y111	0.930	Reliabel
Y112	0.929	Reliabel
Y113	0.926	Reliabel
Y114	0.922	Reliabel
Y115	0.923	Reliabel
Y116	0.921	Reliabel
Y117	0.922	Reliabel
Y118	0.927	Reliabel

Heteroskedasitas

Scatterplot



Coefisien

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.270	.627		2.026	.051
	Pengawasan APIP	.685	.140	.649	4.904	.000
a. Dependent Variabel: Kualitas Pelaporan Keuangan						

Model Summery

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.649 ^a	.422	.404	.319
a. Predictors: (Constant), Pengawasan APIP				

Correlations

		Pengawasan APIP	Kualitas Pelaporan Keuangan
APIP	Pearson Correlation	1	.649**
	Sig. (1-tailed)		.000
	N	35	35
Kualitas Pelaporan Keuangan	Pearson Correlation	.649**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	
	N	35	35
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).			



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3600/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

KEPALA DESA MARISA

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Nurfatia Patuke
NIM : E1118016
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : KANTOR DESA SEKECAMATAN MARISA KABUPATEN
POHUWATO
Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN PENGAWASAN APIP
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 27 September 2021

Ketua,

Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104

+



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
KECAMATAN MARISA
DESA POHUWATO

Alamat : Jln. Pelabuhan Dusun Binakarya Telp. (0443)210572

SURAT KETERANGAN

No. **503/DP-MRS/SK/ 358 /IV/2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMAD HUSIN, S.Pd.I**
Jabatan : Sekretaris Desa Pohuwato
Alamat : Desa Pohuwato Kec.Marisa Kab.Pohuwato

Dengan ini menerangkan Kepada :

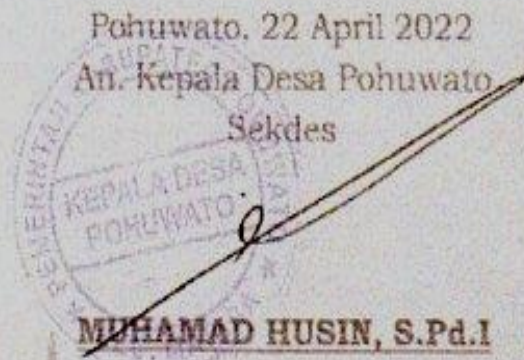
Nama : **NURFATIA PATUKE**
NIM : **E11.18.016**
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi/Akuntansi

Bahwa yang bersangkutan benar-benar melaksanakan penelitian dengan judul
**"PENGARUH PENERAPAN PENGAWASAN APIP TERHADAP KUALITAS PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DESA"** di Desa Pohuwato dari tanggal 01 Maret sampai
dengan 07 Maret 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan Kepada yang bersangkutan
untuk digunakan seperlunya.

Pohuwato, 22 April 2022

An. Kepala Desa Pohuwato
Sekdes


MUHAMAD HUSIN, S.Pd.I

PAPER NAME

SKRIPSI NURFATIA PATUKE.docx

AUTHOR

Nurfatia Patuke

WORD COUNT

16004 Words

CHARACTER COUNT

93600 Characters

PAGE COUNT

100 Pages

FILE SIZE

339.9KB

SUBMISSION DATE

May 18, 2022 9:39 AM GMT+8

REPORT DATE

May 18, 2022 9:44 AM GMT+8**● 13% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 13% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Pribadi



Nama	: NURFATIA PATUKE
NIM	: E11.18.016
Tempat/TglLahir	: Gorontalo, 04-10-1994
JenisKelamin	: Perempuan
Angkatan	: 2018
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Agama	: Islam
Alamat	: Jl.Bandeng Kelurahan Ipilo Kota Gorontalo
No Hp	: 0822 1995 2631
Email	: thyadevice@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

2001 – 2006	: SDN NO 62 Kota Timur
2008 – 2011	: SMP Negeri 2 Marisa
2016	: PAKET C Dinas Pendidikan Kota Gorontalo
2018 - 2022	: Universitas Ichsan Gorontalo